



***Laporan Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah
(LKjIP)***



**SATUAN POLISI PAMONG PRAJA
DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN LEBAK
TAHUN 2025**

KATA PENGANTAR

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak (Sat Pol PP Dan Damkar Kabupaten Lebak) Tahun 2025 ini merupakan perwujudan konkrit tingkat Pencapaian Kinerja (*Performing Government*) dan juga sebagai pertanggungjawaban atas pelaksanaan Renstra periode 2025-2030.

Perwujudan pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan hal yang signifikan dalam upaya pelayanan publik yang memadai. Satpol PP Dan Damkar Kabupaten Lebak sebagai unsur penunjang Pemerintah Daerah di bidang pembinaan Ketentraman dan Ketertiban Umum, Penegakan Peraturan Daerah dan produk Hukum Daerah, Penanggulangan Kebakaran serta Pengamanan dan Pengawasan, sebagaimana hal tersebut dapat dilaksanakan secara transparan dalam kerangka penyelenggaraan akuntabilitas oleh Pemerintah Kabupaten Lebak.

Diharapkan LKjIP Sat Pol PP Dan Damkar Kabupaten Lebak Tahun 2025 ini dapat memberikan informasi yang diharapkan oleh seluruh pemangku kepentingan tentang pencapaian kinerja kegiatan – kegiatan yang telah dilaksanakan. Masukan dan saran dari para pembaca laporan ini sangat diharapkan untuk meningkatkan kinerja di masa yang akan datang, sehingga dapat memberikan kontribusi yang lebih baik lagi bagi Pemerintah Kabupaten Lebak.

Rangkasbitung, Januari 2026
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN LEBAK



YADI BASARI GUNAWAN, SE., M.Si.

Pembina Utama Muda IV/c
NIP. 19751101 199503 1 002

DAFTAR ISI

Kata Pengantar	i
Daftar isi	ii
Ringkasan Eksekutif	iii
BAB I PENDAHULUAN	
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Struktur Organisasi	2
1.3. Kepegawaian	3
1.4. Tugas Pokok Dan Fungsi	4
1.5. Sistematika Penyusunan	6
BAB II PERENCANAAN KINERJA	8
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA	
3.1. Capaian Kinerja Organisasi	13
3.2. Realisasi Anggaran	26
BAB IV PENUTUP	
A. Kesimpulan	38
B. Tindak Lanjut	39
Lampiran – Lampiran	

RINGKASAN EKSEKUTIF

LKjIP Tahun 2025 yang merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja dalam melaksanakan rencana strategis Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Lebak (Sat Pol PP Lebak) Tahun 2025-2030 adalah dokumen evaluasi dalam mendapatkan umpan balik peningkatan kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak (Sat Pol PP Dan Damkar Lebak), dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Berdasarkan saran/arahan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi bahwa sasaran dan indikator kinerja yang ada dalam Indikator Kinerja Utama (IKU) dapat diringkaskan dipilih sasaran yang betul-betul strategis. Berikut Indikator Kinerja Utama (IKU) Sat Pol PP Dan Damkar Lebak beserta capaiannya pada Tahun 2025, yaitu:

- A. Sasaran IKU Meningkatnya Penyelenggaraan Penegakan Perda dan Ketertiban Umum, Indikatornya adalah Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU). Tingkat capaian kinerja atas indikator sasaran tersebut sebesar 99,82% dimana capaian tersebut dicapai dari jumlah realisasi dengan angka sebesar 73,87 dari 74,00 yang ditargetkan. Nilai tersebut termasuk kategori Baik (60,01 - 80,00). Dibandingkan dengan tahun 2024 (Base line) dengan angka capaiannya sebesar 73,57%, maka tahun ini mengalami kenaikan capaian sekitar 0,3 poin. Faktor yang paling mempengaruhi yaitu pada Dimensi Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya pada sub dimensi Peningkatan SDM, dimana pada Tahun 2025 tidak ada program peningkatan kapasitas SDM akibat keterbatasan kemampuan Daerah.
- B. Sasaran IKU Meningkatnya Pelayanan Penanggulangan kejadian Kebakaran di Daerah, indikatornya yaitu Persentase Layanan Respon Cepat (*Response Time*) Penanggulangan Kejadian Kebakaran. Tingkat capaian kinerja pada tahun 2025 ini sebesar 120,25% yang didapatkan dari hasil realisasi sebesar 72,15% sedangkan target yang ditetapkan ialah 60,00%. Capaian ini mengalami kenaikan sebesar 15,90% dimana capaian pada Tahun 2024 sebesar 56,25%. Salah satu faktor kenaikan capaian ini adalah bertambahnya Pos Pemadam Kebakaran (PMK) Kecamatan, yaitu di Kecamatan Bayah dan Kecamatan Leuwidamar. Kejadian kebakaran yang tidak tertanggulangi mayoritas dikarenakan tidak adanya laporan kejadian dan sulitnya akses ke tempat kejadian kebakaran sehingga tidak dilakukan penanggulangan.

- C. Sasaran IKU Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan tingkat kepuasan masyarakat atas layanan publik dalam urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penanggulangan kebakaran dengan Indikator Sasarannya: Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Nilai SAKIP yang dihitung ialah nilai Laporan Kinerja tahun sebelumnya yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah. Untuk Nilai SAKIP ini Sat Pol PP Dan Damkar Lebak menerima nilai 78,95 dengan predikat BB (Sangat Baik). Capaian ini mengalami kenaikan sebesar 0,60 apabila dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar 78,35 poin. Dengan demikian capaian Nilai SAKIP sebesar 100,57% dari nilai target sebesar 78,50 poin. Untuk Nilai IKM pada tahun 2024 dilaksanakan secara online melalui google form atau bitlink dengan alamat bit.ly/lebakopd/satpolpp, dimana masyarakat dapat menilai kinerja pelayanan Sat Pol PP Dan Damkar Lebak dengan mengisi form yang telah disediakan. Penilaian akhir direkap oleh Tim dari Untirta dan Satpol PP mendapatkan nilai 84,74 dengan kualifikasi mutu pelayanan memuaskan dan capaian sebesar 101,73% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 83,30 poin. Dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 dengan raihan nilai 83,29, maka capaian ini mengalami kenaikan. Nilai ini sesuai dengan Permen Pan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan nilai mutu pelayanan B atau Memuaskan (Nilai Konversi 76,61 – 88,30). Capaian ini melebihi target nilai IKM Tahun 2024 yang memiliki target nilai 80.

Anggaran Belanja pada Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD TA 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 3) tanggal 08 Agustus 2025 dan Peraturan Bupati Lebak Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2025 (Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 21) tanggal 11 Agustus 2025, sebesar Rp. 13.332.225.606,-. Atau sebesar 0,46% dari total APBD Kabupaten Lebak yang sebesar Rp. 2.901.355.045.932,-. Sampai akhir bulan Desember 2025 telah terealisasi Sebesar Rp. 12.818.234.367,- atau 96,14 %. Dibandingkan dengan tingkat capaian realisasi anggaran Tahun 2024 yang mencapai 98,08% tahun ini mengalami penurunan sebesar 1,94%. Hal ini dapat menggambarkan bahwa tingkat keberhasilan kinerja Sat Pol PP Dan Damkar Lebak Kabupaten Lebak sudah sangat baik.

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

LKjIP Tahun 2025 yang merupakan bagian dari informasi pengukuran kinerja dalam melaksanakan Rencana Strategis (Renstra) Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak (Sat Pol PP Dan Damkar Lebak) Tahun 2025-2030 adalah dokumen evaluasi dalam mendapatkan umpan balik peningkatan kinerja pelaksanaan berbagai program dan kegiatan yang telah dilaksanakan oleh Sat Pol PP Dan Damkar Lebak, dengan berorientasi kepada hasil yang ingin dicapai melalui visi, misi, tujuan dan sasaran strategis yang telah ditetapkan. Perencanaan Strategis disusun dan disajikan dalam Dokumen Renstra Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak Tahun 2025-2030. Renstra dijabarkan setiap tahunnya dalam bentuk perencanaan kinerja dan perjanjian kinerja.

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran Kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses penyusunan kebijakan/program/kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Pelaksanaan evaluasi ditujukan untuk mengidentifikasi sejauhmana kemampuan perangkat daerah dalam melaksanakan program dan kegiatannya, mengidentifikasi realisasi pencapaian target kinerja program dan kegiatan Renstra SKPD, serta mengetahui hambatan dan permasalahan yang dihadapi.

Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa Sat Pol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Perlindungan masyarakat diwujudkan dengan pembentukan Satuan Tugas Satuan Perlindungan Masyarakat (Satgas Sat Linmas) yang secara khusus disiapkan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana, ikut memelihara ketenteraman dan ketertiban masyarakat, membantu penanganan ketenteraman ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu, serta membantu upaya pertahanan Negara.

Memelihara Ketentraman dan Ketertiban Umum serta Penegakan Perda dan Perkada bukanlah persoalan mudah namun harus dihadapi dengan kesungguhan dan kesabaran, mengingat kompleksitas permasalahan yang terjadi di tingkat masyarakat. Sesuai dengan potensi dan kapasitas yang dimiliki, Sat Pol PP Dan Damkar Lebak berupaya untuk menampilkan performa profesional. Untuk itu diharapkan menjadi aparat yang handal dan mempunyai kemampuan pemikiran yang jernih, serta kesehatan dan kemampuan fisik yang prima untuk menunjang keberhasilan dalam tugas-tugas di lapangan.

Sat Pol PP, Linmas dan Pemadam Kebakaran merupakan rumpun urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana amanat Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Konsekuensi dari urusan wajib pelayanan dasar adalah Pemerintah Daerah selaku ujung tombak pelayanan kepada masyarakat memprioritaskan pelaksanaan urusan yang diharapkan dapat memaksimalkan pelayanan yang menjadi hak masyarakat selaku warga negara. Ukuran pelayanan masyarakat dalam konteks pemberian layanan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Standar pelayanan Minimal (SPM). SPM Pemadam Kebakaran diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, sedangkan SPM Sat Pol PP diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

1.2 Struktur Organisasi

Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak telah ditetapkan berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak serta Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak.

Kedudukan Sat Pol PP Dan Damkar Lebak merupakan perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketentraman, ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran.

Sat Pol PP Dan Damkar Lebak dipimpin oleh seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Struktur organisasi beserta uraian tata kerja yang komprehensif dapat menggambarkan wewenang dan tanggung jawab setiap unsur organisasi, rentang pengendalian dan interaksi antara pimpinan dan bawahannya serta mekanisme koordinasi internal organisasi guna menjamin kesepahaman, kesatuan arah dan keterpaduan dalam pencapaian tujuan organisasi. Susunan Organisasi Sat Pol PP Dan Damkar Lebak terdiri dari :

- a. Kepala Satuan.
- b. Sekretariat, terdiri dari :
 1. Sub Bagian Program;
 2. Sub Bagian Keuangan; dan
 3. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian.
- c. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri dari :
 1. Seksi Pengamanan Pengawasan dan Pengendalian Massa; dan
 2. Seksi Satuan Perlindungan Masyarakat.
- d. Bidang Penegakan Perundang-undangan Daerah, terdiri dari :
 1. Seksi Pembinaan, Pengawasan dan Penyuluhan; dan
 2. Seksi Penyelidikan dan Penyidikan.
- e. Bidang Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan, terdiri dari:
 1. Seksi Pencegahan; dan
 2. Seksi Penanggulangan dan Penyelamatan.
- f. Kelompok Jabatan Fungsional;
- g. Kelompok Jabatan Pelaksana

1.3 Kepegawaian

Pelaksanakan tugas pokok dan fungsi Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak sampai dengan akhir Tahun 2025 didukung oleh pegawai sebanyak 126 orang yang terdiri atas PNS sebanyak 36 Orang, CPNS sebanyak 3 Orang, Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K) sebanyak 5 Orang dan Tenaga Bantu Jasa Keamanan dan Ketertiban Umum atau biasa disebut Ban Pol PP sebanyak 82 Orang.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 60 Tahun 2012 Tentang Pedoman Penetapan Jumlah Polisi Pamong Praja, dalam Bab II pasal 11 dari hasil *scoring* Satuan Polisi Pamong Praja mendapatkan skor 625, sesuai dengan pasal 11 huruf b yaitu 500 sampai dengan 750, maka jumlah pegawai Sat Pol PP di Kabupaten/Kota sebanyak 251 sampai dengan 350 pegawai, sedangkan personil Sat Pol PP Kab. Lebak (ASN dan Non ASN) saat ini hanya berjumlah 126 orang.

Untuk itu penambahan personil sangat diperlukan baik melalui formasi Aparatur Sipil Negara (ASN) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) dan Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (PPPK/P3K) maupun melalui jalur mutasi dari Perangkat Daerah lainnya di Kabupaten Lebak.

Pegawai Sat Pol PP Dan Damkar Lebak baik itu secara kuantitas maupun kompetensi masih sangat kurang dalam menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsinya khususnya untuk memenuhi kebutuhan personil di Bidang Damkar dimana ada dua Posko Pemadam yaitu satu di Rangkasbitung dan lima lagi di Kecamatan Malingping, Kecamatan Cileles, Kecamatan Cipanas, Kecamatan Bayah dan Kecamatan Leuwidamar.

Peningkatan kompetensi, pemenuhan hak pegawai serta pemenuhan sarana dan prasarana pendukung pelaksanaan kinerja Sat Pol PP Dan Damkar harus lebih ditingkatkan khususnya dalam rangka penerapan Standar Pelayanan Minimal (SPM), pelayanan dasar yang merupakan Urusan Pemerintahan Wajib yang berhak diperoleh setiap Warga Negara secara minimal

1.4 Tugas Pokok dan Fungsi

Sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 16 Tahun 2018 Tentang Satuan Polisi Pamong Praja bahwa Sat Pol PP adalah perangkat daerah yang dibentuk untuk menegakkan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, menyelenggarakan ketertiban umum dan ketenteraman serta menyelenggarakan perlindungan masyarakat. Perlindungan masyarakat diwujudkan dengan pembentukan Satuan Perlindungan Masyarakat (Sat Linmas) yang secara khusus disiapkan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana, ikut memelihara ketenteraman ketertiban masyarakat, membantu penanganan ketenteraman ketertiban dan keamanan dalam penyelenggaraan pemilu, serta membantu upaya pertahanan Negara.

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor Nomor 9 Tahun 2021 Tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lebak dan Peraturan Bupati Nomor 32 Tahun 2023 Tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas Dan Fungsi Serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak, Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak yang adalah perangkat Pemerintah Daerah dalam memelihara dan menyelenggarakan ketenteraman, ketertiban umum, penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran. Satpol PP dan Damkar dipimpin oleh

seorang Kepala Satuan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretariat Daerah.

Pemadam Kebakaran, Sat Pol PP dan Sat Linmas merupakan rumpun urusan wajib yang berkaitan dengan pelayanan dasar sebagaimana amanat Pasal 12 Undang-Undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Konsekuensi dari urusan wajib pelayanan dasar adalah Pemerintah Daerah selaku ujung tombak pelayanan kepada masyarakat memprioritaskan pelaksanaan urusan yang diharapkan dapat memaksimalkan pelayanan yang menjadi hak masyarakat selaku warga negara. Ukuran pelayanan masyarakat dalam konteks pemberian layanan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Standar pelayanan Minimal (SPM). SPM Pemadam Kebakaran diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota, sedangkan SPM Sat Pol PP diatur lebih lanjut dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota.

Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina, dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah pada urusan ketentuan, ketertiban umum, menegakkan Perda dan Perkada, pemadam kebakaran dan perlindungan masyarakat.

Dengan demikian, Sat Pol PP Dan Damkar Lebak dalam menjalankan tugas pokok dan fungsinya membutuhkan jumlah personil yang rasional dan proporsional dengan Sumber Daya Manusia (SDM) yang profesional dan handal.

Kewenangan Satuan dalam menyelenggarakan urusan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada pasal 2 Peraturan Bupati Lebak Nomor 32 Tahun 2023, meliputi sub urusan:

- a. Ketenteraman dan Ketertiban Umum;
- b. Bencana; dan
- c. Kebakaran

Sub urusan ketenteraman dan ketertiban umum meliputi:

- a. Penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban umum dalam Daerah;
- b. Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- c. Pembinaan Penyidik Pegawai Negeri Sipil

Sub urusan kebakaran yang diselenggarakan oleh Sat. Pol. PP meliputi:

- a. Pencegahan, pengendalian, pemadaman, penyelamatan, dan penanganan bahan berbahaya dan beracun kebakaran dalam Daerah;
- b. Inspeksi peralatan proteksi kebakaran;
- c. Investigasi kejadian kebakaran;
- d. Pemberdayaan masyarakat dalam pencegahan kebakaran

a. Tugas Pokok

Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak mempunyai tugas pokok merumuskan, menyelenggarakan, membina, dan mengevaluasi penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah pada urusan ketertiban umum, menegakan Peraturan Bupati dan Peraturan Kepala Daerah, pemadam kebakaran dan perlindungan masyarakat.

b. Fungsi

Untuk melaksanakan tugas tersebut Sat Pol PP Dan Damkar Lebak mempunyai fungsi sebagaimana diatur dalam pasal 8 yaitu :

- 1) Penyusunan program dan pelaksanaan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat, perlindungan masyarakat, serta pelaksana pemadam kebakaran;
- 2) Pelaksanaan kebijakan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- 3) Pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat di Daerah;
- 4) Pelaksanaan kebijakan perlindungan masyarakat;
- 5) Pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati serta penyelenggaraan ketertiban umum dan ketenteraman masyarakat dengan Kepolisian Negara Republik Indonesia, Penyidik Pegawai Negeri Sipil dan/atau aparatur lainnya;
- 6) Pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya.

1.5 Sistematika Penyusunan

LKjIP Sat Pol PP Dan Damkar Lebak Tahun 2025 disusun berdasarkan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 Tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja instansi Pemerintah.

Adapun sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bab ini menjelaskan gambaran umum organisasi dengan penekanan kepada aspek strategis organisasi serta permasalahan utama (*strategic issued*) yang sedang dihadapi.

BAB II : PERENCANAAN KINERJA

Pada bab ini menjelaskan ringkasan/ikhtisar perjanjian kinerja tahun yang bersangkutan.

BAB III : AKUNTABILITAS KINERJA

A. Capaian Kinerja Organisasi

Pada sub bab ini menjelaskan tentang capaian kinerja organisasi untuk setiap pernyataan kinerja sasaran strategis organisasi sesuai dengan pengukuran kinerja organisasi.

B. Realisasi Anggaran

Pada sub bab ini diuraikan realisasi anggaran yang digunakan dan yang telah digunakan untuk mewujudkan kinerja organisasi sesuai dengan dokumen perjanjian kinerja.

BAB IV : P E N U T U P

Pada bab ini diuraikan simpulan umum atas capaian kinerja organisasi serta langkah di masa mendatang yang akan dilakukan organisasi untuk meningkatkan kinerjanya.

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

Pengukuran kinerja digunakan sebagai dasar untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan sasaran dan tujuan yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi instansi pemerintah. Pengukuran Kinerja merupakan hasil dari suatu penilaian yang sistematis didasarkan pada kelompok indikator kinerja kegiatan yang berupa indikator masukan, keluaran, hasil, manfaat, dan dampak. Penilaian tersebut tidak terlepas dari proses penyusunan kebijakan / program / kegiatan yang dianggap penting dan berpengaruh terhadap pencapaian sasaran dan tujuan.

Tabel 2.1. Indikator Kinerja Utama Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penanggulangan kebakaran	Meningkatnya Penyelenggaraan Penegakan Perda dan Ketertiban Umum	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Poin)	74,00
2.		Meningkatnya Pelayanan Penanggulangan kejadian Kebakaran di Daerah	Persentase Layanan Respon Cepat (Response Time) Penanggulangan Kejadian Kebakaran (%)	60,00
3.		Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan tingkat kepuasan masyarakat atas layanan publik dalam urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penanggulangan kebakaran	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	78,50
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Poin)	83,30

Tabel. 2.3. Rencana Kinerja dan Anggaran Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak Tahun 2025

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/ Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025					
							Lokasi		Target		Pagu Indikatif	
1					Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar							13.332.225.606
1	05				Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat							13.332.225.606
1	05	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai Sakip Perangkat Daerah Nilai IKM Perangkat Daerah		78,50 83,30	Poin Poin		9.155.071.106	
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Rangkas bitung	100	%		222.190.000	
1	05	01	2.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rangkas bitung	3	Dok.		1.460.000	
1	05	01	2.01	002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rangkas bitung	1	Dok.		730.000	
1	05	01	2.01	003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Rangkas bitung	1	Dok.		730.000	
1	05	01	2.01	004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Rangkas bitung	1	Dok.		730.000	
1	05	01	2.01	005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perubahan DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Rangkas bitung	1	Dok.		730.000	
1	05	01	2.01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rangkas bitung	3	Dok.		217.810.000	
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Daerah	Rangkas bitung	100	%		4.817.952.326	
1	05	01	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Rangkas bitung	39	Org./Bln.		4.817.952.326	
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Umum Penunjang Perangkat Daerah	Rangkas bitung	100	Persen		116.105.100	
1	05	01	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Rangkas bitung	3	Paket		14.500.000	

1	05	01	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Rangkas bitung	3	Paket	22.354.000
1	05	01	2.06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Rangkas bitung	2	Paket	5.925.000
1	05	01	2.06	007	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Rangkas bitung	4	Paket	24.826.000
1	05	01	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lebak / Luar Kab. Lebak	2	Laporan	33.000.000
1	05	01	2.06	011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rangkas bitung	1	Dokumen	15.500.000
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah yang dilaksanakan		100	Persen	3.247.186.280
1	05	01	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Rangkas bitung	12	Laporan	53.957.300
1	05	01	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan		12	Laporan	3.193.228.980
1	05	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik		100	Persen	751.637.500
1	05	01	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Rangkas bitung	8	Unit	162.480.500
1	05	01	2.09	002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan	Rangkas bitung	11	Unit	525.421.000
1	05	01	2.09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Rangkas bitung	15	Unit	19.960.000
1	05	01	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Rangkas bitung	1	Unit	43.776.000
1	05	02			Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penegakan Perda		100	%	582.381.200
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Penanganan Terhadap Gangguan Keamanan dan Ketertiban Umum		100	%	462.682.000
1	05	02	2.01	004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kabupaten Lebak	1	Dokumen	7.700.000

1	05	02	2.01	015	Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Kabupaten Lebak	12 Laporan	105.900.000
1	05	02	2.01	016	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kabupaten Lebak	12 Laporan	344.032.000
1	05	02	2.01	018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Kabupaten Lebak	1 Unit	5.050.000
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota yang ditegakan		100 %	119.907.700
1	05	02	2.02	004	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Rangkas bitung	1 Dok.	2.180.000
1	05	02	2.02	006	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	Rangkas bitung	4 Unit	22.567.900
1	05	02	2.02	011	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Kabupaten Lebak	1 Laporan	30.610.000
1	05	02	2.02	012	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yg Dilakukan Terhadap Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kabupaten Lebak	1 Laporan	64.549.800
2	05	04			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan pencegahan dan penanggulangan serta penyelamatan terhadap bahaya kebakaran dan non kebakaran		100 %	3.594.564.800
2	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pelaksanaan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten / Kota		100 %	3.594.564.800

2	05	04	2.01	001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Kabupaten Lebak	1 Dok.	6.309.800
2	05	04	2.01	002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan bahaya kebakaran yang tertangani	Kabupaten Lebak	12 Laporan	175.500.000
2	05	04	2.01	005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Kabupaten Lebak	1 Dok.	3.412.755.000

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA

3.1 Capaian Kinerja Organisasi

Terselenggaranya Pemerintahan yang baik (*good governance*) merupakan prasyarat bagi terlaksananya sistem pemerintahan dalam mewujudkan aspirasi masyarakat dan mencapai tujuan serta cita-citanya. Untuk itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas, terukur dan sesuai dengan ketentuan, sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, berhasil guna, bersih dan bertanggung jawab serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme.

Sehubungan dengan hal tersebut di atas, sebagai perwujudan pertanggungjawaban pencapaian pelaksanaan program dan kegiatan organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Laporan Akuntabilitas Kinerja mencerminkan hasil pencapaian kinerja berdasarkan visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan. Adapun capaian kinerja organisasi diukur dengan melihat sejauh mana capaian Indikator Kinerja Umum berdasarkan tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang telah ditetapkan.

A. Capaian IKU Sat Pol PP Dan Damkar Lebak Tahun 2025

Terdapat 3 Capaian Indikator Kinerja Utama berdasarkan tujuan, sasaran dan indikator sasaran yang telah ditetapkan seperti tabel berikut.

Tabel 3.1. Capaian IKU Sat Pol PP Dan Damkar Lebak Tahun 2025

No	Tujuan	Sasaran	Indikator Sasaran	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penanggulangan kebakaran	Meningkatnya Penyelenggaraan Penegakan Perda dan Ketertiban Umum	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	74,00	73,87	99,82%
2.		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana kebakaran	Persentase Layanan Respon Cepat (Response Time) Penanggulangan Kejadian Kebakaran	60,00	72,15	120,25%
3.		Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan tingkat kepuasan masyarakat atas layanan publik dalam urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penanggulangan kebakaran	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP)	78,50	78,95	100,57%
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	83,30	84,74	101,73%

1. Capaian Sasaran Meningkatnya Penyelenggaraan Penegakan Perda dan Ketertiban Umum dengan Indikator Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)

Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) merupakan indeks yang digunakan untuk mengukur kinerja Pemerintah Daerah, khususnya Satpol PP dalam konteks penegakkan Perda/Perkada, serta Penyelenggaraan Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat (Tibumtranmas). Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 100.4.3-669 Tahun 2022 tentang Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat. IPKKU juga menjadi salah satu instrumen dalam penyusunan kebijakan serta instrumen pengukuran dan penilaian kinerja penyelenggaraan urusan ketenteraman dan ketertiban umum di provinsi dan kabupaten/kota serta penyusunan RPJMD dan Renstra Pemerintah Daerah sesuai Instruksi Menteri Dalam Negeri No. 2 Tahun 2025 tentang Pedoman Penyusunan RPJMD dan Renstra Perangkat Daerah Tahun 2025-2029. Oleh karena itu, IPKKU dapat memberikan gambaran kuantitatif tentang sejauh mana Pemerintah Daerah berhasil menjalankan tugasnya dalam penyelenggaraan Tibumtranmas.

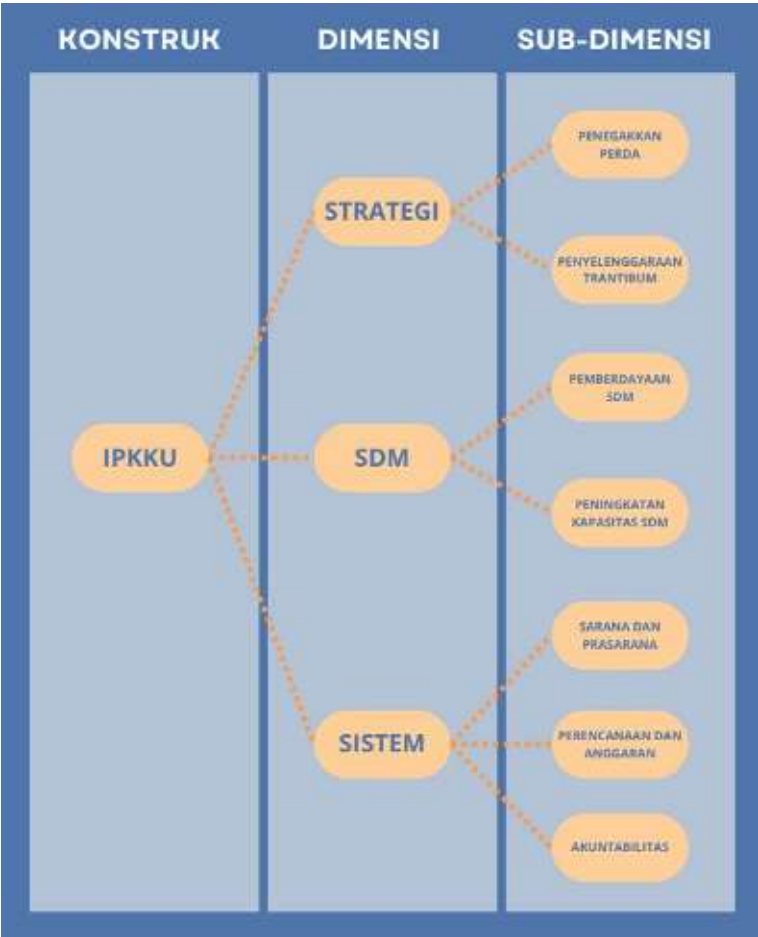
Tujuan dari IPKKU adalah untuk meningkatkan kualitas penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota dan menjadi dasar evaluasi dan perbaikan dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta menjadi acuan bagi Pemerintah Daerah dalam menyusun kebijakan serta program terkait ketenteraman dan ketertiban umum.

IPKKU diukur menggunakan tiga dimensi pengukuran dan sub-dimensi dari masing-masing dimensinya, yaitu Strategi (Penegakan Perda dan Penyelenggaraan Trantibum), SDM (Pemberdayaan SDM dan Peningkatan Kapasitas SDM) dan Sistem (Saranan dan Prasarana, Perencanaan dan Anggaran serta Akuntabilitas).

Tabel 3.2. Format Penilaian Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) Provinsi dan Kabupaten/Kota

Provinsi/Kab /Kota	Penegakan Perda	Penyelenggaraan Trantibum	Pemberdayaan SDM	Peningkatan Kapasitas SDM	Sarana dan Prasarana	Perencanaan dan Anggaran	Akuntabilitas	Strategi	SDM	Sistem	IPKKU	Kategori
Provinsi												
Kab/Kota												
Kab/Kota												
Kab/Kota												

Gambar. 3.1. Variabel dan Indikator IPKKU



Pencapaian Indikator Kinerjanya dapat digambarkan dalam tabel berikut.

Tabel 3.3. Capaian Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) Tahun 2024 dan Tahun 2025

Dimensi	Sub Dimensi	Dimensi		Sub Dimensi		Nilai IPKKU		Keterangan	
		2024	2025	2024	2025	2024	2025	2024	2025
Strategi	Penegakkan Perda	89,20	84,75	80,8	69,91	73,57	73,87	Baik	Baik
	Penyelenggaraan Trantibum			93,4	92,16				
SDM	Pemberdayaan SDM	58,57	62,82	83,8	90,07				
	Peningkatan Kapasitas SDM			83,8	35,56				
Sistem	Sarana dan Prasarana	87,21	84,31	67,13	84,89				
	Perencanaan dan Anggaran			100	84,91				
	Akuntabilitas			81,7	82,53				

Berdasarkan tabel di atas, nilai IPKKU Sat Pol PP Dan Damkar Lebak Tahun 2025 sebesar 73,87 yang berarti mengalami kenaikan sebesar 0,3 poin dari Tahun 2024 yang mendapatkan nilai IPKKU sebesar 73,57. Nilai IPKKU ini belum sesuai dengan target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 74 poin, namun pencapaian ini termasuk ke dalam kategori baik

Adapun hambatan/masalah yang dihadapi dalam pencapaian kinerja di atas adalah sebagai berikut;

1. Belum terpenuhinya standar jumlah dan kompetensi SDM yang tidak seimbang dengan luas cakupan wilayah dan beban kerja yang dimiliki;
2. Masih banyaknya pelanggaran Perda/Perkada dikarenakan rendahnya kesadaran hukum dan kepatuhan masyarakat terhadap pelaksanaan Perda/Perkada;
3. Terbatasnya sarana dan prasarana serta anggaran.

Terlepas dari segala hambatan dan permasalahan di atas, target capaian realisasi atas indikator kinerja tidak dapat dipenuhi karena didasari oleh beberapa hal yaitu:

1. Kurangnya data dukung dalam menentukan target IPKKU pada Renstra 2025-2029 dikarenakan data yang dimiliki hanya capaian Tahun 2024, data pada tahun sebelumnya tidak bisa didapatkan dari pihak Kemendagri. Hal ini menyebabkan kurangnya informasi untuk analisa dan penetapan target capaian IPKKU pada Renstra 2025-2029. Untuk itu perlu adanya penyesuaian target pada Perubahan Renstra 2025-2029 sesuai dengan kemampuan dan kondisi yang berkembang;
2. Hasil nilai yang didapatkan hanya berbentuk angka capaian saja tidak dilengkapi dengan penjelasan maupun rekomendasi tindak lanjut yang harus dilaksanakan;
3. Penilaian IPKKU Tahun 2025 berdasarkan hasil capaian sampai dengan Bulan September 2025 (Tri Wulan III 2025), sedangkan banyak capaian kinerja baru bisa dilaksanakan pada Tri Wulan IV 2025 karena adanya penyesuaian dan perubahan anggaran ;
4. Sumber daya yang dimiliki belum bisa memenuhi tuntutan masyarakat secara menyeluruh.

Upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan yang bisa dijadikan rekomendasi dalam pencapaian kinerja yaitu melalui:

- Peningkatan kualitas sumber daya manusia dengan pelatihan dan peningkatan kompetensi secara mandiri baik secara daring maupun luring melalui lembaga pengembangan SDM Daerah (Propinsi dan Kabupaten) serta kementerian/lembaga terkait.
- Optimalisasi sarana dan prasarana, serta penerapan teknologi dalam pengawasan dan penindakan. Dengan segala keterbatasan yang ada sebisa mungkin memanfaatkan segala sumber daya yang dimiliki untuk hasil yang optimal
- Penguatan kerjasama dengan berbagai pihak terkait secara formal dan legal.

2. Capaian Sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana kebakaran di Kabupaten Lebak Tahun 2025

Capaian Sasaran Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana kebakaran di Kabupaten Lebak Tahun 2025 oleh Sat Pol PP Dan Damkar Lebak pada Tahun 2025 dengan indikator Persentase Layanan Respon Cepat (*Response Time*) Penanggulangan Kejadian Kebakaran adalah sebesar 72,15% dari target yang ditetapkan sebesar 60%. Angka ini lebih tinggi sebesar 15,90% dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2024 sebesar 56,25%.

Capaian ini berdasarkan hasil penanggulangan kebakaran dari 79 kejadian/kasus kebakaran yang terjadi selama tahun 2025 di seluruh wilayah Kabupaten Lebak, yang tertanggulangi sebanyak 57 kasus dalam waktu tanggap dan 22 kasus tidak tertanggulangi. Kejadian kebakaran yang tidak tertanggulangi umumnya dikarenakan tidak adanya laporan ketika kejadian sehingga tidak dilakukan penanggulangan. Selain itu ada pula kasus yang disebabkan aksesibilitas menuju tempat kejadian sulit dijangkau atau sangat jauh dari Pos Pemadam Kebakaran. Luasnya cakupan penanganan bencana kebakaran yang meliputi seluruh wilayah Kabupaten Lebak tidak sebanding dengan kekuatan yang dimiliki yaitu hanya 5 (empat) Posko PMK yaitu Posko utama di Rangkasbitung dan Posko Kecamatan yang berlokasi di Kecamatan Malingping, Kecamatan Cileles, Kecamatan Cipanas dan Kecamatan Bayah.

Tabel 3.4. Jumlah Layanan Penyelamatan Dan Evakuasi Korban Kebakaran Di Kabupaten Kota Dalam Tingkat Waktu Tanggap Kabupaten Lebak Tahun 2025

No.	Bulan	Penanggulangan Kebakaran dalam waktu tanggap						
		Tertanggulangi		Tidak		Jumlah Kejadian	Response Time (Menit)	Rerata (Menit)
		Jumlah	%	Jumlah	%			
1	2	3	4=(3/7)x100	5	6=(5/7)x100	7=3+5	8	9
1	JANUARI	4	80,00	1	20,00	5	55	11
2	FEBRUARI	4	66,67	2	33,33	6	104	17
3	MARET	0	-	1	100,00	1	21	21
4	APRIL	6	75,00	2	25,00	8	195	24
5	MEI	3	42,86	4	57,14	7	127	18
6	JUNI	3	60,00	2	40,00	5	120	24
7	JULI	3	75,00	1	25,00	4	76	19
8	AGUSTUS	7	77,78	2	22,22	9	141	16
9	SEPTEMBER	6	85,71	1	14,29	7	101	14
10	OKTOBER	4	57,14	3	42,86	7	274	39
11	NOVEMBER	7	87,50	1	12,50	8	134	17
12	DESEMBER	9	75,00	3	25,00	12	771	64
TOTAL		56	70,89	23	29,11	79	2.119	27

Selain penanggulangan kebakaran, Sat Pol PP Dan Damkar menangani pula penyelamatan non kebakaran yang diantaranya evakuasi binatang berbahaya masuk rumah warga, penyelamatan hewan peliharaan dan juga penyelamatan yang dapat membahayakan nyawa manusia. Capaian penyelamatan non kebakaran berada pada angka 96,33%, dimana jumlah kasus yang tertanggulangi sebanyak 236 kasus dan 9 kasus yang tidak tertanggulangi dari total pengaduan sebanyak 245 Kasus. Kasus yang tidak tertanggulangi adalah evakuasi hewan yang bisa membahayakan keselamatan jiwa manusia (ular), ketika dilakukan eksekusi di lapangan ternyata hewan tersebut tidak ditemukan atau sudah melarikan diri dari lokasi pertama kali dilaporkan.

Tabel 3.5. Rekapitulasi Penyelamatan Non Kebakaran di Kabupaten Lebak Tahun 2025

No.	Bulan	Penyelamatan Non Kebakaran				
		Tertanggulangi		Tidak		Jumlah Kejadian
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1	2	8	$9=(8/12) \times 100$	10	$11=(10/12) \times 100$	$12=8+10$
1	JANUARI	17	94,44%	1	5,56%	18
2	FEBRUARI	17	100,00%	0	0,00%	17
3	MARET	19	100,00%	0	0,00%	19
4	APRIL	33	91,67%	3	8,33%	36
5	MEI	30	100,00%	0	0,00%	30
6	JUNI	19	100,00%	0	0,00%	19
7	JULI	20	100,00%	0	0,00%	20
8	AGUSTUS	17	100,00%	0	0,00%	17
9	SEPTEMBER	12	100,00%	0	0,00%	12
10	OKTOBER	20	100,00%	0	0,00%	20
11	NOVEMBER	12	75,00%	4	25,00%	16
12	DESEMBER	20	95,24%	1	4,76%	21
TOTAL		236	96,33%	9	3,67%	245

Dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 sebesar 95,33%, capaian kinerja penanggulangan kebakaran dan non kebakaran mengalami kenaikan sebesar 1,00%. Salah satu faktor yang menyebabkan kenaikan yaitu tingginya pengaduan masyarakat dan bertambah pula variasi laporan yang diadukan. Hal ini dapat dilihat dari bertambahnya jumlah kasus pengaduan penyelamatan non kebakaran sebesar 128,97% dimana pada Tahun 2024 terdapat 107 kasus.

Secara keseluruhan, capaian kinerja penanggulangan kebakaran dan non kebakaran adalah 92,59% dari target yang ditetapkan sebesar 100%. Angka ini lebih tinggi sebesar 2,22% dibandingkan dengan capaian pada Tahun 2024 sebesar 90,37%.

Tabel 3.6. Rekapitulasi Penanggulangan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran di Kabupaten Lebak Tahun 2025

No.	Bulan	Tertanggungi		Tidak		Jumlah Kejadian
		Jumlah	%	Jumlah	%	
1	2	3	4=(3/7)x100%	5	6=(5/7)x100%	7=3+5
1	JANUARI	21	91	2	8,70	23
2	FEBRUARI	22	95,65	1	4,35	23
3	MARET	20	100,00	0	-	20
4	APRIL	40	90,91	4	9,09	44
5	MEI	37	100,00	0	-	37
6	JUNI	22	91,67	2	8,33	24
7	JULI	23	95,83	1	4,17	24
8	AGUSTUS	24	92,31	2	7,69	26
9	SEPTEMBER	19	100,00	0	-	19
10	OKTOBER	24	88,89	3	11,11	27
11	NOVEMBER	19	79,17	5	20,83	24
12	DESEMBER	29	87,88	4	12,12	33
TOTAL		300	92,59	24	7,41	324

Adapun hambatan/masalah yang dihadapi dalam pencapaian kinerja Sub urusan Pemadam Kebakaran di atas adalah sebagai berikut;

1. Jumlah Pos Pemadam Kebakaran beserta SDM dan Sarpras penunjangnya masih sangat sedikit, dari 28 kecamatan di seluruh Kabupaten Lebak baru terdapat 1 Unit Mako Damkar dan 5 Pos PMK Kecamatan (Kecamatan Malingping, Cileles, Cipanas, Bayah dan Leuwidamar), dimana idealnya minimal satu kecamatan satu pos PMK;
2. Luasnya cakupan wilayah tugas pelayanan dan jenis pelayanan (Pemadam kebakaran dan Penyelamatan non kebakaran) tidak diimbangi dengan jumlah personil dan sarpras yang dimiliki;
3. Masih banyak masyarakat yang mengetahui adanya Pos PMK di wilayahnya walaupun sosialisasi melalui aparat pemerintah baik itu tingkat desa maupun kecamatan telah dilakukan;
4. Aksesibilitas ke lokasi kejadian kebakaran yang jauh dan sulit dilalui oleh mobil pemadam kebakaran.

Namun demikian, capaian realisasi target indikator dapat terpenuhi dengan baik dan memenuhi tuntutan layanan terhadap masyarakat. Keberhasilan capaian ini didapatkan karena:

1. Kesiapsiagaan petugas Damkar yang didukung peningkatan kompetensi dan penerapan Standar Operasi dan Prosedur (SOP) secara baik;

2. Melakukan kerjasama dengan instansi terkait mengenai pelaksanaan Sosialisasi dan kegiatan Pencegahan dini lainnya serta meningkatkan partisipasi Masyarakat secara aktif dalam mencegah bahaya kebakaran;
3. Mengoptimalkan sarana dan prasarana yang dimiliki secara efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan pelayanan kepada masyarakat

Upaya perbaikan kinerja penanggulangan kebakaran bisa melalui langkah-langkah:

- Pencegahan melalui sosialisasi dan peningkatan kesadaran masyarakat serta deteksi dini dengan melakukan pengawasan terhadap titik-titik rawan kebakaran baik itu pemukiman maupun daerah hutan dan lahan
- Koordinasi antar instansi dan stakeholder serta partisipasi masyarakat melalui pembentukan Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) di setiap Desa/Kelurahan.
- Penyediaan sarana prasarana yang memadai.

3. Capaian Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dan Pelayanan Publik Tahun 2025

IKU yang ke-tiga Sat Pol PP Dan Damkar Lebak Tahun 2025 yaitu Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dan Pelayanan Publik dengan sasaran berupa Meningkatnya Kinerja Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah Dan Pelayanan Publik dengan indikator berupa Nilai SAKIP dan IKM. Nilai SAKIP yang dihitung ialah nilai Laporan Kinerja tahun sebelumnya yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah. Untuk Nilai SAKIP ini Sat Pol PP Dan Damkar Lebak menerima nilai 78,35 dengan predikat BB (Sangat Baik). Capaian ini mengalami kenaikan sebesar 4,19 poin apabila dibandingkan dengan Tahun 2024 yaitu sebesar 74,16. Namun masih di bawah target yaitu 80 poin.

Tabel 3.7. Hasil Evaluasi SAKIP Sat Pol PP Dan Damkar Lebak Tahun 2025

No.	Komponen Yang Dievaluasi	Bobot Evaluasi	Nilai	
			2024	2025
1	Perencanaan Kinerja	30	22,80	26,10
2	Pengukuran Kinerja	30	21,30	22,50
3	Pelaporan Kinerja	15	12,16	9,75
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20,00	20,00
Nilai Hasil Evaluasi		100	76,26	78,35
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja			BB	BB

Hambatan yang ada lebih kepada koordinasi antar bidang dikarenakan lokasi kantor yang berbeda dan perubahan pegawai yang melaksanakan tugas evaluasi dan pelaporan sehingga mengalami keterlambatan. Untuk mengatasi hal tersebut, dilaksanakan pertemuan secara intensif oleh tim penyusun evaluasi dan pelaporan pada tiap bidang di lingkungan Sat Pol PP Dan Damkar Lebak menyusun dan secara bersama dan menyeluruh.

Untuk Nilai IKM dilaksanakan secara online melalui *google form* dengan alamat bit.ly/lebakopd/satpolpp. Metode ini memungkinkan masyarakat dapat menilai kinerja pelayanan Sat Pol PP dengan mengisi form yang telah disediakan. Penilaian akhir direkap oleh Tim dari Untirta dan Sat Pol PP Dan Damkar Lebak, Nilai IKM yang diperoleh adalah 83,29, mengalami kenaikan bila dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 dengan raihan nilai 81,66. Nilai ini sesuai dengan Permen Pan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan nilai mutu pelayanan B atau Memuaskan (Nilai Konversi 76,61 – 88,30). Capaian ini melebihi target nilai IKM Tahun 2025 yang memiliki target nilai 80 namun masih dibawah IKM Lebak dengan nilai 83,90.

**Tabel 3.8. IKM Satpol PP dan Damkar
Berdasar Indikator Komposit Tahun 2025**

1	Kemudahan Persyaratan	87,71	B	Di atas rerata
2	Kemudahan Prosedur	86,24	B	Di atas rerata
3	Ketepatan Waktu Buka Pelayanan	80,00	B	Di bawah rerata
4	Ketepatan Waktu Istirahat	81,65	B	Di bawah rerata
5	Ketepatan Waktu Tutup Pelayanan	82,57	B	Di bawah rerata
6	Ketepatan Waktu Tunggu Pelayanan	81,65	B	Di bawah rerata
7	Kewajaran Biaya	86,61	B	Di atas rerata
8	Biaya Tambahan	86,06	B	Di atas rerata
9	Produk Sesuai Harapan	85,32	B	Di atas rerata
10	Angka Komplain	82,57	B	Di bawah rerata
11	Ketrampilan Petugas	86,79	B	Di atas rerata
12	Kemampuan Kominfo	83,67	B	Di atas rerata
13	Pengalaman Petugas	85,14	B	Di atas rerata
14	Responsivitas Petugas	85,50	B	Di atas rerata
15	Non Diskriminasi	86,61	B	Di atas rerata
16	Kesantunan	86,24	B	Di atas rerata
17	Keramahan	82,39	B	Di bawah rerata
18	Keberadaan Maklumat Pelayanan	73,39	C	Di bawah rerata
19	Integritas Maklumat Pelayanan	76,51	C	Di bawah rerata
20	Ketersediaan Sarana Pengaduan	82,02	B	Di bawah rerata
21	Respon Pengaduan Sesuai Harapan	82,39	B	Di bawah rerata
22	Kebersihan Lingkungan	77,80	B	Di bawah rerata
23	Kenyamanan Ruang Pelayanan	74,50	C	Di bawah rerata
24	Kebersihan Toilet Umum	74,13	C	Di bawah rerata
25	Ketersediaan APAR	86,42	B	Di atas rerata
26	Efektivitas Larangan Merokok	70,28	C	Di bawah rerata
27	Sarptra Tdk Membahayakan	84,22	B	Di atas rerata
28	Keamanan	84,22	B	Di atas rerata
29	Ketersediaan Sarptra Afirmasi	81,47	B	Di bawah rerata
30	Ketersediaan Rambu-rambu Mitigasi Bencana	79,08	B	Di bawah rerata
31	Ketersediaan Pely. Online	85,14	B	Di atas rerata

Adapun kondisi permasalahan/kekurangan dari unsur pelayanan dapat digambarkan sebagai berikut :

- Masih kurangnya SDM dan Sarpras yang dimiliki oleh Sat Pol PP Dan Damkar Lebak dalam melaksanakan pelayanan publik.
- Kompetensi dan profesionalitas petugas yang melaksanakan pelayanan publik harus ditingkatkan sesuai dengan kapasitasnya.
- Media pengaduan yang ada harus disosialisasikan secara luas dan berkelanjutan.
- Tindaklanjut pengaduan harus ditingkatkan (cepat dan tuntas).

Hambatan ataupun kekurangan dalam capaian Survei Kepuasan Masyarakat antara lain karena keterbatasan masyarakat dalam mengisi SKM yang hanya bisa diakses melalui gawai, sedangkan tidak seluruh masyarakat yang bisa atau melek teknologi. Oleh karena itu terkadang pengisiannya menggunakan gawai milik petugas/anggota Sat Pol PP Dan Damkar yang ada di lapangan. Selain itu keterbatasan sarana dan prasarana pendukung pelayanan publik karena keterbatasan anggaran yang dimiliki. Namun demikian, pelayanan publik seoptimal mungkin dilaksanakan oleh seluruh aparat Sat Pol PP Dan Damkar Lebak sesuai Tupoksi yang diembannya.

Adapun tindaklanjut sebagai upaya perbaikan kinerja adalah sebagai berikut:

- Pemenuhan Sarana dan Prasarana pendukung pelayanan publik pada Sat Pol PP Dan Damkar baik itu melalui APBD, Bantuan Keuangan Propinsi maupun sumber lainnya yang sah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
- Peningkatan kompetensi pegawai/petugas sesuai dengan kompetensinya agar bisa lebih kompeten dan profesional.
- Sosialisasi Media Pengaduan Masyarakat melalui berbagai bentuk media agar masyarakat dapat lebih mudah mendapatkan layanan secara cepat dan tuntas.
- Menempatkan petugas yang khusus menerima dan melanjutkan pengaduan masyarakat ke berbagai unit kerja pada Sat Pol PP Dan Damkar sesuai dengan bidang tugasnya.

B. Capaian IKU Sat Pol PP Dan Damkar Lebak Tahun 2025 - 2030

TABEL 3.9. CAPAIAN INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN LEBAK

NO	INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)		Baseline (Tahun 2024)	Tahun 2025		Tahun 2026		Tahun 2027		Tahun 2028		Tahun 2029		Tahun 2030	
				Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian	Target	Capaian
1.	Meningkatnya Penyelenggaraan Penegakan Perda dan Ketertiban Umum	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (Poin)	73,57	74	73,87	74,25	-	74,50	-	74,75	-	75	-	75	-
2.	Meningkatnya Pelayanan Penanggulangan kejadian Kebakaran di Daerah	Persentase Layanan Respon Cepat (<i>Response Time</i>) Penanggulangan Kejadian Kebakaran (%)	56,25	60	70,89	60,25	-	60,50	-	60,75	-	61	-	61	-
3.	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan tingkat kepuasan masyarakat atas layanan publik dalam urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penanggulangan kebakaran	Nilai SAKIP Perangkat Daerah (Poin)	78,35	78,50	78,95	79	-	79,35	-	79,60	-	79,90	-	80	-
		Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) Perangkat Daerah (Poin)	83,20	83,30	84,74	83,35	-	83,40	-	83,50	-	83,80	-	84	-

Berdasarkan tabel di atas, secara umum kinerja Sat Pol PP Dan Damkar Lebak cenderung naik.

**TABEL 3.10. LAPORAN REALISASI INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH
RENCANA STRATEGIS (RENSTRA) TAHUN 2025-2030
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN**

NO.	ASPEK/FOKUS/BIDANG URUSAN/ INDIKATOR KINERJA PEMBANGUNAN DAERAH	FORMULASI	SATUAN	TARGET	REALI SASI	TINGKAT CAPAIAN	PENJELASAN
1	2	3	4	5	6	7	8
2	ASPEK PELAYANAN UMUM						
3	Fokus Layanan Urusan Pemerintah Wajib yang Berkaitan dengan Pelayanan Dasar						
1105	KETENTERAMAN, KETERTIBAN UMUM DAN PERLINDUNGAN MASYARAKAT						
1	Tingkat Waktu Tanggap (Response time) pengaduan kebakaran (<15 Menit Setelah Pengaduan)	$\frac{\text{Jumlah penanggulangan kebakaran dalam response time}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran dalam jangkauan response time}} \times 100\%$	Persen	60	70,89	118,15	56 penanggulangan dalam response time dari 79 kejadian kebakaran
2	Cakupan pencegahan dan penanggulangan serta penyelamatan terhadap bahaya kebakaran dan non kebakaran	$\frac{\text{Jumlah penanggulangan kebakaran dan penyelamatan non kebakaran}}{\text{Jumlah kejadian kebakaran dan non kebakaran}} \times 100\%$	Persen	100	92,59	92,59	300 penanggulangan dan penyelamatan dari 324 kejadian kebakaran dan non kebakaran
3	Persentase Penegakan Perda	$\frac{\text{Jumlah pelanggaran perda yg ditindaklanjuti}}{\text{Jumlah pelanggaran perda yg diadukan/ditemukan}} \times 100\%$	Persen	100	100,00	100,00	78 Kasus Pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti dari 78 Kasus pelanggaran perda yg diadukan/ ditemukan

Berdasarkan tabel 3.10. di atas, pencapaian Tahun 2025 dengan target Tahun 2025 di Renstra yang dicapai pada tiga indikator yaitu:

1. Tingkat Waktu Tanggap (*Response time*) pengaduan kebakaran (<15 Menit Setelah Pengaduan) hanya tercapai 118,15% dimana realisasi sebesar 70,89% dari target sebesar 60% dengan penanggulangan dalam *response time* sebanyak 56 kasus dari 79 kejadian kebakaran .

Faktor penghambat capaian ini disebabkan oleh:

- Lokasi Kebakaran jauh dari Pos Pemadam atau tidak adanya laporan kebakaran yang masuk ketika terjadi kebakaran, sehingga tidak bisa ditanggulangi oleh petugas.
- Kondisi jalan yang buruk atau macet, serta lokasi kebakaran yang sulit dijangkau (misalnya, gang sempit di pemukiman padat) dapat memperlambat waktu tempuh.
- Masih sedikitnya Pos Pemadam Kebakaran yang tersedia di seluruh wilayah Kabupaten Lebak (baru terdapat 1 Mako Pos Pemadam dan 4 Pos PMK Kecamatan dari 28 kecamatan yang ada).
- Belum efektifnya Relawan Pemadam Kebakaran (REDKAR) yang telah dibentuk.
- Anggaran yang terbatas dapat menghambat pengadaan peralatan pemadam kebakaran yang memadai, pelatihan petugas, dan pemeliharaan sarana.

Untuk mengatasi hambatan di atas perlu adanya tindaklanjut yang bisa dilaksanakan antara lain:

- Menambah anggaran pengadaan dan pemeliharaan sarana dan prasarana pendukung secara bertahap berdasarkan prioritas sesuai dengan kemampuan fiskal daerah.
 - Menambah Pos Pemadam Kebakaran Kecamatan beserta personil dan sarana dan prasarana pendukungnya khususnya pada daerah-daerah rawan kebakaran.
 - Memberdayakan REDKAR yang telah dibentuk yang didahului dengan peningkatan kompetensinya sebagai bentuk pemberdayaan masyarakat dalam Pencegahan dan penanggulangan kebakaran di tiap Desa/Kelurahan di wilayah Kab. Lebak.
2. Cakupan pencegahan dan penanggulangan serta penyelamatan terhadap bahaya kebakaran dan non kebakaran tercapai sebanyak 92,59% yang didapat dari 300 penanggulangan dan penyelamatan dari 324 kejadian kebakaran dan non kebakaran. Selain penanggulangan kebakaran, Damkar melaksanakan pula penyelamatan non kebakaran berupa upaya penyelamatan yang membahayakan manusia seperti evakuasi hewan ular, biawak, sarang tawon dan lain sebagainya. Adapula yang berupa pelepasan cincin yang susah dilepas, penanganan pohon tumbang dan penyelamatan lainnya. Terdapat 9 kasus penyelamatan non kebakaran yang tidak tertanggulangi yaitu berkaitan dengan evakuasi ular di

pemukiman penduduk dimana ketika dilaksanakan pencarian ular tersebut tidak bisa ditemukan atau sudah tidak ada di lokasi yang dilaporkan.

3. Persentase Penegakan Perda yaitu berupa tindaklanjut pengaduan atas pelanggaran Perda. Tahun 2025 sebanyak 78 Kasus Pelanggaran Perda yang ditindaklanjuti dari 78 Kasus pelanggaran perda yg diadukan/ ditemukan, dengan demikian tercapai sebesar 100%. Sedangkan target yang ditetapkan pada Renstra di Tahun 2025 sebesar 100%, maka capaian kinerja indikator ini adalah sebesar 100%. Keberhasilan capaian ini dikarenakan Pengaduan Pelanggaran Perda/Perkada yang diterima langsung ditindaklanjuti dan dapat diselesaikan secara efektif dan efisien sesuai dengan SOP. Selain itu adanya kerjasama dengan instansi terkait baik itu instansi Pemerintah Daerah (Perangkat Daerah terkait, Kecamatan dan Desa/Kelurahan) maupun instansi lainnya khususnya dengan Aparat Penegak Hukum (APH) di wilayah Kabupaten Lebak baik itu dengan pihak Kejaksaan maupun Polri.

3.2 Realisasi Anggaran

Akuntabilitas pencapaian kinerja keuangan tahun 2025 merupakan tingkat pencapaian target dari masing-masing indikator keuangan yang telah ditetapkan dalam dokumen rencana kerja. Pengukuran tingkat pencapaian kinerja keuangan didasarkan pada data hasil pengukuran kinerja keuangan. Sedangkan realisasi capaian efektivitas dan efisiensi berdasarkan program, Kegiatan dan Sub kegiatan dapat diuraikan sebagai berikut.

Anggaran Belanja pada Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD TA 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 3) tanggal 08 Agustus 2025 dan Peraturan Bupati Lebak Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2025 (Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 21) tanggal 11 Agustus 2025, sebesar Rp. 13.332.225.606,-. Atau sebesar 0,46% dari total APBD Kabupaten Lebak yang sebesar Rp. 2.901.355.045.932,- terdiri dari Belanja Operasional sebesar Rp. 10,040,970,606,- terbagi ke dalam dua kode rekening yaitu Belanja Pegawai sebesar Rp. 4.817.952.326,-, dan Belanja Barang Jasa sebesar Rp. 5,223,018,280,- serta Belanja Modal sebesar Rp. 3.291.255.000,-. Sampai akhir bulan Desember 2025 telah terealisasi Sebesar Rp. 12.818.234.367,- atau 96,14 persen dengan rincian Belanja Operasional Sebesar 9.555.116.467,- dan Belanja Modal sebesar Rp. 3.263.117.900,-. Hal ini dapat menggambarkan bahwa tingkat keberhasilan kinerja Sat Pol PP Dan Damkar Lebak Kabupaten Lebak sudah sangat baik.

Untuk lebih lengkapnya, Realisasinya pada Tahun 2025 seperti dimaksud di atas disajikan pada tabel berikut.

Tabel 3.11. Capaian Kinerja Dan Keuangan Satuan Polisi Pamong Praja Tahun 2025

Kode					Urusan/Bidang Urusan Pemerintahan Daerah dan Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Indikator Kinerja Program/Kegiatan/Sub Kegiatan	Rencana Tahun 2025			Realisasi Tahun 2025		Persentase Capaian Kinerja (%)	Persentase Anggaran (%)
							Lokasi Pelaksanaan	Target Capaian Kinerja	Kebutuhan Dana/Pagu Indikatif	Capaian Kinerja	Ralisasi Anggaran		
1					2	3	4	5	6	7	8	9=7/5*100	10=8/6*100
1					Urusan Pemerintahan Wajib Yang Berkaitan Dengan Pelayanan Dasar				13.332.225.606		12.818.234.367		96,14
1	05				Bidang Ketenteraman Dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat				13.332.225.606		12.818.234.367		96,14
1	05	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kab./Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah		78,50 Poin	9.155.071.106	78,95 Poin	8.602.989.785	100,57	94,89
								83,30 Poin		84,74 Poin		101,73	
1	05	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Keselarasan Dokumen Perencanaan dengan Dokumen Perencanaan Pembangunan Daerah	Rangkas bitung	100 %	23.912.200	100 %	21.238.000	100	94,37
1	05	01	2.01	001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Rangkasbitung	3 Dok	1.460.000	3 Dok	1.380.000	100	94,52
1	05	01	2.01	002	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen RKA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Rangkasbitung	1 Dok	730.000	1 Dok	690.000	100	94,52
1	05	01	2.01	003	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jml. Dok. Perubahan RKA-SKPD dan Lap. Hasil Koordinasi Penyusunan Dok. Perubahan RKA-SKPD	Rangkasbitung	1 Dok	730.000	1 Dok	690.000	100	94,52
1	05	01	2.01	004	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen DPA-SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Rangkasbitung	1 Dok	730.000	1 Dok	690.000	100	94,52
1	05	01	2.01	005	Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jml. Dok. Perubahan DPA-SKPD dan Lap. Hasil Koordinasi Penyusunan Dok. Perubahan DPA-SKPD	Rangkasbitung	1 Dok	730.000	1 Dok	690.000	100	94,52
1	05	01	2.01	006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Rangkasbitung	3 Dok	217.819.000	3 Dok	205.532.000	100	94,36
1	05	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persentase Capaian Administrasi Keuangan Daerah	Rangkas bitung	100 %	4.752.434.779	100 %	4.639.643.580	100	92,81
1	05	01	2.02	001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Pembayaran gaji dan tunjangan ASN	Rangkasbitung	39 Org/Bln	4.817.952.326	39 Org/Bln	4.471.381.217	100	92,81
1	05	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persentase Penyediaan Sarana Umum Penunjang Perangkat Daerah	Rangkas bitung	100 %	116.105.000	100 %	104.943.550	100	90,39
1	05	01	2.06	002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jml. Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Rangkasbitung	3 Paket	14.500.000	3 Paket	13.718.250	100	94,61
1	05	01	2.06	004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yg Disediakan	Rangkasbitung	3 Paket	22.354.000	3 Paket	20.352.000	100	91,04
1	05	01	2.06	005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Rangkasbitung	2 Paket	5.925.000	2 Paket	5.837.100	100	98,52
1	05	01	2.06	006	Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Rangkasbitung	4 Paket	24.826.000	4 Paket	21.587.500	100	86,96

1	05	01	2.06	009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Jumlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Kab. Lebak / Luar Kab. Lebak	2 Lap	33.000.000	2 Lap	32.850.000	100	99,55
1	05	01	2.06	011	Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Rangkasbitung	1 Dok	15.500.000	1 Dok	10.598.700	100	68,38
1	05	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Jasa Penunjang Urusan Pemda yang dilaksanakan	Rangkasbitung	100 %	3.247.186.280	100 %	3.187.922.984	100	98,17
1	05	01	2.08	002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Rangkasbitung	12 Lap	53.957.300	12 Lap	48.659.784	100	90,18
1	05	01	2.08	004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jml. Lap. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Rangkasbitung	12 Lap	3.193.228.980	12 Lap	3.139.263.200	100	98,31
1	05	01	2.09		Pemeliharaan BMD Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persentase Barang Milik Daerah dalam Kondisi Baik		100 %	751.637.500	100 %	713.205.886	100	94,89
1	05	01	2.09	001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Rangkasbitung	8 Unit	162.480.500	8 Unit	152.622.800	100	93,93
1	05	01	2.09	002	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kend. Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Rangkasbitung	11 Unit	525.421.000	11 Unit	499.820.792	100	95,13
1	05	01	2.09	006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yg Dipelihara	Rangkasbitung	15 Unit	19.960.000	15 Unit	18.797.894	100	94,18
1	05	01	2.09	009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Rangkasbitung	1 Unit	43.776.000	1 Unit	41.964.400	100	95,86
1	05	02			Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Persentase Penegakan Perda		100 %	552.381.200	100 %	535.962.000	100	97,64
1	05	02	2.01		Penanganan Gangguan Trantibum dalam 1 (satu) Daerah Kab/ Kota	Cakupan Penanganan Terhadap Gangguan Keamanan dan Tibum		100 %	374.271.200	96,26 %	364.952.000	100	97,44
1	05	02	2.01	004	Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Linmas dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Kabupaten Lebak	1 Dok	7.700.000	1 Dok	7.700.000	100	100
1	05	02	2.01	015	Pencegahan Gangguan Trantibum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Trantibum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Kabupaten Lebak	12 Lap	105.900.000	12 Lap	103.000.000	100	97,26
1	05	02	2.01	016	Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Trantibum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Kabupaten Lebak	12 Lap	344.032.000	12 Lap	335.274.000	100	97,45
1	05	02	2.01	018	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Kabupaten Lebak	1 Unit	5.050.000	1 Unit	4.878.450	100	96,60
1	05	02	2.02		Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Persentase Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota yang ditegakan		100 %	119.907.700	100 %	118.002.130	100	98,41
1	05	02	2.02	004	Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Perda dan Peraturan Kepala Daerah	Rangkasbitung	1 Dok	2.180.000	1 Unit	1.917.000	100	87,94

1	05	02	2.02	006	Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	Rangkasbitung	4 Unit	22.567.900	4 Unit	21.482.810	100	87,94
1	05	02	2.02	011	Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Kabupaten Lebak	1 Lap	30.610.000	1 Lap	30.510.000	100	99,67
1	05	02	2.02	012	Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yg Dilakukan Terhadap Kepatuhan thd Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Kabupaten Lebak	1 Lap	64.549.800	1 Lap	64.092.320	100	99,29
2	05	04			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Cakupan pencegahan dan penanggulangan serta penyelamatan terhadap bahaya kebakaran dan non kebakaran		100 %	3.594.564.100	92,57 %	3.562.254.150	92,57	99,10
2	05	04	2.01		Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Tingkat Waktu Tanggap (Response time) pengaduan kebakaran (<15 Menit Setelah Pengaduan)		100 %	3.594.564.100	92,57 %	3.562.254.150	92,57	99,10
2	05	04	2.01	001	Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kab/Kota Setiap Tahunnya	Kabupaten Lebak	1 Dok	6.309.800	1 Dok	6.023.820	100	95,47
2	05	04	2.01	002	Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persentase pengaduan bahaya kebakaran yang tertangani	Kabupaten Lebak	12 Lap	175.500.000	12 Lap	175.500.000	100	100
2	05	04	2.01	005	Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jml Dok Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarpras Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Kabupaten Lebak	1 Dok	3.412.755.000	1 Dok	3.380.730.330	100	99,06

Berdasarkan uraian ikhtisar pencapaian kinerja di atas, dapat dilihat bahwa ada beberapa hambatan yang menyebabkan pelaksanaan program dan kegiatan tidak dapat direalisasikan anggaran secara optimal yakni:

Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, Dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah:

- a. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah total anggaran Rp 1.460.000,- realisasi sebesar Rp 1.380.000,- atau 94,52 persen, sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 80.000,- berasal dari Belanja Makanan dan Minuman Rapat, sebagai bentuk **efisiensi** anggaran yang didapat dari hasil penawaran harga dari proses E-Katalog.
- b. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD total anggaran Rp 730.000,- realisasi sebesar Rp. 690.000,- atau 94,52 persen, sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 40.000,- berasal dari Belanja Makanan dan Minuman Rapat, sebagai bentuk **efisiensi** anggaran yang didapat hasil penawaran harga dari proses E-Katalog.
- c. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD total anggaran Rp 730.000,- realisasi sebesar Rp. 690.000,- atau 94,52 persen, sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 40.000,- berasal dari Belanja Makanan dan Minuman Rapat, sebagai bentuk **efisiensi** anggaran yang didapat hasil penawaran harga dari proses E-Katalog.
- d. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan DPA-SKPD total anggaran Rp 730.000,- realisasi sebesar Rp. 690.000,- atau 94,52 persen, sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 40.000,- berasal dari Belanja Makanan dan Minuman Rapat, sebagai bentuk **efisiensi** anggaran yang didapat hasil penawaran harga dari proses E-Katalog.
- e. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Perubahan DPA-SKPD SKPD total anggaran Rp 730.000,- realisasi sebesar Rp. 690.000,- atau 94,52 persen, sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 40.000,- berasal dari Belanja Makanan dan Minuman Rapat, sebagai bentuk **efisiensi** anggaran yang didapat hasil penawaran harga dari proses E-Katalog.
- f. Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD total anggaran Rp 217.810.000,- realisasi sebesar Rp. Rp 205.532.000,- atau 94,36 persen, sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 12.278.000,- terdiri Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya sebesar Rp. 178.000,- merupakan **efisiensi** anggaran yang didapat hasil penawaran harga dari proses E-Katalog, Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan sebesar Rp. 12.100.000,- sisa tersebut disebabkan dari alokasi Honorarium Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan yang tidak terisi sampai akhir tahun anggaran 2025.

Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah:

Sub Kegiatan Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN total anggaran Rp.4.817.952.326,- realisasi sebesar Rp 4.471.381.217,- atau 92,81 persen, sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 346.571.109,- terdiri dari Belanja Gaji Pokok PNS sebesar Rp. 167.679.935,-, Belanja Tunjangan Keluarga PNS sebesar Rp. 23.531.220,-, Belanja Tunjangan Keluarga PPPK sebesar Rp. 171.544,-, Belanja Tunjangan Jabatan PNS sebesar Rp. 21.100.000,-, Belanja Tunjangan Beras PNS sebesar Rp. 10.138.800,-, Belanja Tunjangan Beras PPPK sebesar Rp. 217.260,-, Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS sebesar Rp. 8.020.970,-, Belanja Pembulatan Gaji PNS sebesar Rp. 13.687,-, Belanja Pembulatan Gaji PPPK sebesar Rp. 802,-, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS sebesar Rp. 19.977.409,-, Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK sebesar Rp. 7.049,-, Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS sebesar Rp. 403.680,-, Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK sebesar Rp. 6,-, Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS sebesar Rp. 1.210.469,-, Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK sebesar Rp. 12,-, Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS sebesar Rp. 4.263.660,-, Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK sebesar Rp. 348.606,-, Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS sebesar Rp. 89.486.000,-, Sisa dari kode rekening belanja PNS disebabkan oleh alokasi gaji dan tunjangan Pejabat Eselon III 1 Jabatan, Eselon IV 6 Jabatan yang tidak terisi dan pegawai yang pensiun atas nama Raden Angga Syarif TMT per 1 April 2025, kemudian pada kode Rekening Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS dan Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK tidak terserap karena belum berjalannya program tersebut meskipun telah di atur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2020 tentang Penyelenggaraan Tabungan Perumahan Rakyat, selanjutnya pada beberapa kode rekening PPPK yang tidak terserap disebabkan keterlambatan administrasi pengajuan tunjangan anak atas nama Muhammad Iqbal Maulana Aziz, A.md ke Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Lebak yang di alokasikan rencana pembayarannya pada bulan september 2025 namun baru bisa dibayarkan pada bulan desember tahun 2025.

Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah:

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor total anggaran Rp. 14.500.000,- realisasi sebesar Rp. 13.718.250,- atau 94,61 persen, sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 781.750,- terdiri dari Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebesar Rp. 139.750,-, Belanja Modal Alat Kantor Lainnya sebesar Rp. 300.000,-, Belanja Modal Personal Computer sebesar Rp. 342.000,-, sisa tersebut

merupakan **efisiensi** anggaran yang didapat dari hasil penawaran harga dari proses E-Katalog.

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan Logistik Kantor total anggaran Rp. 22.354.000,- realisasi sebesar Rp. 20.352.000,- atau 91,04 persen, sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 2.002.000,- terdiri dari Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya sebesar Rp. 240.000,-, Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp. 320.000,-, Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu sebesar Rp.1.442.000,-, sisa tersebut merupakan **efisiensi** anggaran yang didapat dari hasil penawaran harga dari proses E-Katalog serta disesuaikan dengan kebutuhan SKPD.
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan total anggaran Rp.5.925.000,- realisasi sebesar Rp.5.837.100,- atau 98,52 persen, sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 87.900,- terdiri dari Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 36.000,- dan Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya sebesar Rp. 51.900,- sisa tersebut merupakan **efisiensi** anggaran yang didapat dari hasil penawaran harga dari proses E-Katalog.
- d. Sub Kegiatan Penyediaan Bahan/Material total anggaran Rp. 24.826.000,- realisasi sebesar Rp. 21.587.500,- atau 86,96 persen, sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp.3.238.500,- terdiri dari Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor sebesar Rp. 2.947.000,-, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover sebesar Rp. 228.000,-, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos sebesar Rp.13.500,-, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer sebesar Rp.50.000,- , sisa tersebut merupakan **efisiensi** anggaran yang didapat dari hasil penawaran harga dari proses E-Katalog serta disesuaikan dengan kebutuhan SKPD.
- e. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD total anggaran Rp.33.000.000,- realisasi sebesar Rp. 32.850.000,- atau 99,55 Persen, sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 150.000,- berasal dari Belanja Perjalanan Dinas Biasa , sisa tersebut merupakan **efisiensi** anggaran yang didapat dari uang transportasi perjalanan dinas luar daerah sesuai dengan kebutuhan/*real cost* perjalanan dinas yang dilaksanakan.
- f. Sub Kegiatan Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD total anggaran Rp. 15.500.000,- realisasi sebesar Rp. 10.598.700,- atau 68,38 persen, sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 4.901.300,- berasal dari Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan, sisa tersebut merupakan **efisiensi** anggaran yang didapat dari hasil penawaran proses E-Katalog juga disesuaikan dengan kebutuhan SKPD terhadap jasa iklan.

Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik total anggaran Rp. 53.957.300,- realisasi sebesar Rp. 48.659.784,- atau 90,18 persen, sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 5.297.516,- terdiri dari Belanja Tagihan Listrik sebesar Rp.4.900.564,-, Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan sebesar Rp.396.952,-, sisa anggaran ini merupakan **efisiensi** anggaran yang didapat karena menyesuaikan dengan penggunaan dan tagihan dari penyedia/pihak ketiga baik Belanja Tagihan Listrik maupun Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan.
- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor total anggaran Rp.3.193.228.980,- realisasi sebesar Rp. 3.139.263.200,- atau 98,31 persen, sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 53.965.780,- terdiri dari Belanja Bahan-Bahan Lainnya sebesar Rp.5.350.000,- merupakan **efisiensi** anggaran yang didapat karena menyesuaikan dengan kebutuhan SKPD terhadap Karangan Bunga, Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor sebesar Rp.2.635.160,- tidak terealisasi karena **efisiensi** anggaran yang didapat dari hasil penawaran proses E-Katalog juga disesuaikan dengan kebutuhan SKPD, Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat sebesar Rp. 45.282.540,- tidak terealisasi karena penyesuaian anggaran terhadap 6 pegawai Non Asn yang lulus menjadi PPPK tahun 2025 dan lebih perhitungan pengangggaran gaji pegawai non ASN sebanyak 1 orang serta Potongan Absensi berdasarkan Keputusan Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak Nomor : 814.1/003-polppdamkar/I/2025 tentang Penetapan Pegawai Non ASN pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak, Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah sebesar Rp. 670.000,- tidak terealisasi karena **efisiensi** anggaran yang didapat karena menyesuaikan dengan tagihan penyedia layanan surat kabar/koran, Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN sebesar Rp. 12.480,-, Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN sebesar Rp. 15.600,- tidak terealisasi karena lebih perhitungan pengangggaran gaji pegawai non ASN sebanyak 1 orang.

Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah:

- a. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan total anggran Rp. 162.480.500,- realisasi sebesar Rp. 152.622.800,- atau 93,93 persen, sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 9.857.700,- terdiri dari Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan sebesar Rp.7.080.000,- tidak terealisasi karena kendaraan dinas dengan nomor polisi A 1046 N STNK hilang sehingga tidak bisa dibayar, Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat

Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebesar Rp. 2.777.700,- berasal dari sisa belanja bahan bakar minyak yang penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan SKPD serta **efisiensi** anggaran yang didapat dari penawaran harga belanja pemeliharaan kendaraan dinas pada proses E-Katalog.

- b. Sub Kegiatan Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, Pajak dan Perizinan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan total anggaran Rp. 525.421.000,- realisasi sebesar Rp. 499.820.792,- atau 95,13 persen, sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 25.600.208,- terdiri dari Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan sebesar Rp.16.960.000,- tidak terealisasi disebabkan kelebihan perhitungan saat penganggaran untuk mobil pemadam kebakaran, walaupun tetap membayar pajak, tetapi tarif Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) untuk mobil pemadam kebakaran sangat rendah, yaitu maksimal 0,5% dari nilai kendaraan karena termasuk dalam kategori kendaraan dinas pemerintah dan sosial, Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan sebesar Rp. 8.548.128,- berasal dari sisa belanja bahan bakar minyak yang penggunaannya disesuaikan dengan kebutuhan SKPD serta **efisiensi** anggaran yang didapat dari penawaran harga belanja pemeliharaan kendaraan dinas pada proses E-Katalog, Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus sebesar Rp. 92.080,- sisa penawaran harga belanja pemeliharaan kendaraan dinas roda enam merupakan **efisiensi** anggaran yang didapat dari penawaran harga belanja pemeliharaan kendaraan dinas pada proses E-Katalog.
- c. Sub Kegiatan Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya total anggaran Rp. 19.960.000,- realisasi sebesar Rp. 18.797.894,- atau 94,18 persen, sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 1.162.106,- terdiri dari Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya sebesar Rp. 336.156,-, Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin sebesar Rp. 296.800,-, Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer sebesar Rp. 296.800,-, Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer sebesar Rp. 529.150,- sisa tersebut merupakan **efisiensi** anggaran yang didapat dari penawaran harga proses E-Katalog.
- d. Sub Kegiatan Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya total anggaran Rp. 43.776.000,- realisasi sebesar Rp. 41.964.400,- atau 95,86 persen, sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 1.811.600,- berasal dari Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor, sisa tersebut merupakan **efisiensi** anggaran yang didapat dari penawaran harga proses E-Katalog.

Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota:

- a. Sub Kegiatan Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum total anggaran Rp. 7.700.000,- realisasi sebesar Rp. 7.700.000,- atau 100 persen.
- b. Sub Kegiatan Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan total anggaran Rp. 105.900.000,- realisasi sebesar Rp. 103.000.000,- atau 97,26 persen, sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 2.900.000,- berasal dari belanja lembur, sisa tersebut merupakan alokasi anggaran belanja lembur yang tidak dilaksanakan, dengan rincian 9 pegawai pada bulan oktober 2025 sebesar Rp.2.160.000,-, 3 pegawai pada bulan november 2025 sebesar Rp. 180.000,-, 2 pegawai pada bulan desember 2025 sebesar Rp. 560.000,-.
- c. Sub Kegiatan Penindakan Atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa total anggaran Rp. 344.032.000,- realisasi sebesar Rp. 335.274.000,- atau 97,45 persen, sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 8.758.000,- berasal dari Belanja Makanan dan Minuman Rapat, sisa tersebut merupakan **efisiensi** anggaran yang didapat dari penawaran harga proses E-Katalog serta kelebihan perhitungan penambahan anggaran untuk mendukung kegiatan pengamanan dan penertiban penataan kota rangkasbitung / pemindahan pedagang kaki lima pasar subuh jalan sunan kalijaga ke pasar semi.
- d. Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum total anggaran Rp. 5.050.000,- realisasi sebesar Rp. 4.878.450,- atau 96,60 persen, sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 171.550,-, berasal dari Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas, sisa tersebut merupakan **efisiensi** anggaran yang didapat dari penawaran harga proses E-Katalog.

Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota Dan Peraturan Bupati/Walikota:

- a. Sub Kegiatan Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah total anggaran Rp. 2.180.000,- realisasi sebesar Rp. 1.917.000,- atau 87,94 persen, sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 263.000,- berasal dari Belanja Perjalanan Dinas Biasa, sisa anggaran tersebut berasal dari Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas, sisa tersebut merupakan **efisiensi** anggaran yang didapat dari uang transportasi yang realisasinya disesuaikan dengan perjalanan yang dilaksanakan / real cost.

- b. Sub Kegiatan Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti) total anggaran Rp. 22.567.900,- realisasi sebesar Rp. 1.085.090,- atau 95,19 persen, sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 1.085.090,- terdiri dari Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya sebesar Rp. 78.490,-, Belanja Modal Personal Computer sebesar Rp. 600.000,-, Belanja Modal Peralatan Personal Computer sebesar Rp. 406.600,-, sisa tersebut berasal dari Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas, sisa tersebut merupakan **efisiensi** anggaran yang didapat dari penawaran harga proses E-Katalog.
- c. Sub Kegiatan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala daerah total anggaran Rp. 30.610.000,- realisasi sebesar Rp. 30.510.000,- atau 99,67 persen, sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 100.000,- berasal dari Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (penggandaan), sisa tersebut disebabkan kegiatan yang tidak dilaksanakan.
- d. Sub Kegiatan Pengawasan Atas Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah total anggaran Rp. 64.549.800,- realisasi sebesar Rp. 64.092.320,- atau 99,29 persen, sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 457.480,- berasal dari Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya (cetak spanduk dan penggandaan), sisa tersebut berasal dari Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas, sisa tersebut merupakan **efisiensi** anggaran yang didapat dari penawaran harga proses E-Katalog.

Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun, Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota:

- a. Sub Kegiatan Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota total anggaran Rp. 6.309.800,- realisasi sebesar Rp. 6.023.820,- atau 95,47 persen, sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 285.980,- berasal dari Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya sebesar Rp. 85.980,-, Belanja Makanan dan Minuman Rapat sebesar Rp. 200.000,-, sisa tersebut merupakan **efisiensi** anggaran yang didapat dari penawaran harga proses E-Katalog.
- b. Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota total anggaran Rp. 175.500.000,- realisasi sebesar Rp. 175.500.000,- atau 100 persen.
- c. Sub Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri total anggaran Rp. 3.412.755.000,- realisasi sebesar Rp. 3.380.730.330,- atau 99,06 persen, sisa anggaran yang tidak terealisasi sebesar Rp. 32.024.670,- terdiri dari Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas sebesar Rp. 728.280,-, Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL) sebesar

Rp.3.822.080,-, Belanja Pakaian Olahraga sebesar Rp. 985.810,-, Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus sebesar Rp. 22.980.000,-, Belanja Modal Peralatan Bengkel Khusus Peladam sebesar Rp. 509.500,-, Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran sebesar Rp. 1.010.000,-, Belanja Modal Baju Pengaman sebesar Rp. 1.989.000,-, sisa tersebut merupakan **efisiensi** anggaran yang didapat dari penawaran harga proses E-Katalog.

BAB IV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab sebelumnya, berikut ini capaian Indikator Kinerja Utama (IKU) Sat Pol PP Dan Damkar Lebak pada Tahun 2025, yaitu:

1. Sasaran IKU Meningkatnya Penyelenggaraan Penegakan Perda dan Ketertiban Umum, Indikatornya adalah Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU). Tingkat capaian kinerja atas indikator sasaran tersebut sebesar 99,82% dimana capaian tersebut dicapai dari jumlah realisasi dengan angka sebesar 73,87 dari 74,00 yang ditargetkan. Nilai tersebut termasuk kategori Baik (60,01 - 80,00). Dibandingkan dengan tahun 2024 (Base line) dengan angka capaiannya sebesar 73,57%, maka tahun ini mengalami kenaikan capaian sekitar 0,3 poin. Faktor yang paling mempengaruhi yaitu pada Dimensi Sumber Daya Manusia (SDM) khususnya pada sub dimensi Peningkatan SDM, dimana pada Tahun 2025 tidak ada program peningkatan kapasitas SDM akibat keterbatasan kemampuan Daerah.
2. Sasaran IKU Meningkatnya Pelayanan Penanggulangan kejadian Kebakaran di Daerah, indikatornya yaitu Persentase Layanan Respon Cepat (Response Time) Penanggulangan Kejadian Kebakaran. Tingkat capaian kinerja pada tahun 2025 ini sebesar 120,25% yang didapatkan dari hasil realisasi sebesar 72,15% sedangkan target yang ditetapkan ialah 60,00%. Capaian ini mengalami kenaikan sebesar 15,90% dimana capaian pada Tahun 2024 sebesar 56,25%. Salah satu faktor kenaikan capaian ini adalah bertambahnya Pos Pemadam Kebakaran (PMK) Kecamatan, yaitu di Kecamatan Bayah dan Kecamatan Leuwidamar. Kejadian kebakaran yang tidak tertanggulangi mayoritas dikarenakan tidak adanya laporan kejadian dan sulitnya akses ke tempat kejadian kebakaran sehingga tidak dilakukan penanggulangan.
3. Sasaran IKU Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan tingkat kepuasan masyarakat atas layanan publik dalam urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penanggulangan kebakaran dengan Indikator Sasarannya: Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) dan Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM). Nilai SAKIP yang dihitung ialah nilai Laporan Kinerja tahun sebelumnya yang dilakukan oleh Inspektorat Daerah. Untuk Nilai SAKIP ini Sat Pol PP Dan Damkar Lebak menerima nilai 78,95 dengan predikat BB (Sangat Baik). Capaian ini mengalami kenaikan sebesar 0,60 apabila dibandingkan dengan Tahun 2024 sebesar 78,35 poin. Dengan demikian capaian Nilai SAKIP sebesar 100,57% dari nilai target sebesar 78,50 poin. Untuk Nilai IKM pada tahun

2024 dilaksanakan secara online melalui google form atau bitlink dengan alamat bit.ly/lebakopd/satpolpp, dimana masyarakat dapat menilai kinerja pelayanan Sat Pol PP Dan Damkar Lebak dengan mengisi form yang telah disediakan. Penilaian akhir direkap oleh Tim dari Untirta dan Satpol PP mendapatkan nilai 84,74 dengan kualifikasi mutu pelayanan memuaskan dan capaian sebesar 101,73% dari target yang telah ditetapkan yaitu sebesar 83,30 poin. Dibandingkan dengan capaian Tahun 2024 dengan raihan nilai 83,29, maka capaian ini mengalami kenaikan. Nilai ini sesuai dengan Permen Pan Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik dengan nilai mutu pelayanan B atau Memuaskan (Nilai Konversi 76,61 – 88,30). Capaian ini melebihi target nilai IKM Tahun 2024 yang memiliki target nilai 80.

4. Anggaran Belanja pada Satuan Polisi Pamong Praja Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lebak Nomor 3 Tahun 2025 tentang Perubahan APBD TA 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Lebak Tahun 2025 Nomor 3) tanggal 08 Agustus 2025 dan Peraturan Bupati Lebak Nomor 21 Tahun 2025 tentang Penjabaran Perubahan APBD TA 2025 (Berita Daerah Tahun 2025 Nomor 21) tanggal 11 Agustus 2025, sebesar Rp. 13.332.225.606,-. Atau sebesar 0,46% dari total APBD Kabupaten Lebak yang sebesar Rp. 2.901.355.045.932,-. Sampai akhir bulan Desember 2025 telah terealisasi Sebesar Rp. 12.818.234.367,- atau 96,14 %. Dibandingkan dengan tingkat capaian realisasi anggaran Tahun 2024 yang mencapai 98,08% tahun ini mengalami penurunan sebesar 1,94%. Hal ini dapat menggambarkan bahwa tingkat keberhasilan kinerja Sat Pol PP Dan Damkar Lebak Kabupaten Lebak sudah sangat baik.

B. Tindak Lanjut

Dalam rangka meningkatkan kinerja Sat Pol PP Dan Damkar Kabupaten Lebak maka pada tahun 2025 kami akan melakukan perbaikan dengan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Laporan Kinerja belum menyajikan pencapaian Tahun 2024 dengan target Tahun 2024 di Renstra;
2. Laporan Kinerja belum menyajikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya;
3. Laporan Kinerja belum menyajikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;
4. Laporan Kinerja belum menyajikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

**Matrik Tindak Lanjut Hasil Evaluasi SAKIP Perangkat Daerah
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Lebak**

No	Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024	Tindak Lanjut	Status/Progres Penyelesaian (selesai/belum selesai)	Kondisi Terkini	Masalah yang dihadapi	Link Eviden
1	Laporan Kinerja belum menyajikan pencapaian Tahun 2024 dengan target Tahun 2024 di Renstra	Laporan Kinerja dilengkapi dengan pencapaian Tahun 2024 dengan target Tahun 2024 di Renstra	Selesai	Laporan Kinerja menyajikan pencapaian Tahun 2024 dengan target Tahun 2024 di RPJMD	-	https://drive.google.com/file/d/1pfHToXZ06qtE9HmwHempH HgpdI-Kzj2-/view?usp=sharing
2	Laporan Kinerja belum menyajikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya	Laporan Kinerja dilengkapi dengan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya	Selesai	Laporan Kinerja menyajikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya	-	https://drive.google.com/file/d/1SAPTszvKw0ve6PTDrhlhuI9F GJs6t5nG/view?usp=sharing
3	Laporan Kinerja belum menyajikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja	Laporan Kinerja dilengkapi dengan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja	Selesai	Laporan Kinerja menyajikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja	-	https://drive.google.com/file/d/1_AodZ_xXKiPNUjLDoJYBIP 1N4u8ht3I/view?usp=sharing
4	Laporan Kinerja belum menyajikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)	Laporan Kinerja dilengkapi dengan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)	Selesai	Laporan Kinerja belum menyajikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)	-	https://drive.google.com/file/d/1r4zc-3dWduhgOOSvMPlqkO2SduO n4st0/view?usp=sharing

INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU)
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN LEBAK

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	PENJELASAN/ FORMULASI	SUMBER DATA
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penanggulangan kebakaran	Meningkatnya Penyelenggaraan Penegakan Perda dan Ketertiban Umum	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	Instrumen pengukuran kinerja pemerintah daerah dalam menjalankan urusan ketenteraman, ketertiban umum, dan perlindungan masyarakat (Trantibumlinmas) berdasarkan 3 dimensi, 7 subdimensi, dan 38 indikator yang mencakup SDM, sistem, strategi, penegakan Perda, serta pelayanan perlindungan masyarakat	Bidang Trantibum dan Bidang PPUD
2.		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana kebakaran	Persentase Layanan Respon Cepat (Response Time) Penanggulangan Kejadian Kebakaran	Rata-rata waktu tanggap, dihitung dari pelaporan, penyiapan tim dan peralatan, jarak tempuh dan kesiapan pemadaman kebakaran	Bidang Pemadam Kebakaran
3.		Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan tingkat kepuasan masyarakat atas layanan publik dalam urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penanggulangan kebakaran	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Perpres No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Permen Pan-RB Nomor 12 Tahun 2015 tentang Pedoman Evaluasi atas Implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Permen Pan-RB Nomor 14 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Survei Kepuasan Masyarakat Unit Penyelenggara Pelayanan Publik	Sekretariat

Rangkasbitung, Desember 2025

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan
Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak



YADI BASARI GUNAWAN, SE., M.Si.

Pembina Utama Muda / IVc.

NIP. 19751101 199503 1 002

MATRIKS RENSTRA TAHUN 2025 - 2030
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN LEBAK

NO	TUJUAN	SASARAN	INDIKATOR SASARAN	TARGET					
				2025	2026	2027	2028	2029	2030
1.	Terwujudnya tata kelola pemerintahan dan pelayanan publik dalam penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum serta penanggulangan kebakaran	Meningkatnya Penyelenggaraan Penegakan Perda dan Ketertiban Umum	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) (Poin)	74,00	74,25	74,50	74,75	75,00	75,00
2.		Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana kebakaran	Persentase Layanan Respon Cepat (Response Time) Penanggulangan Kejadian Kebakaran (%)	60,00	60,25	60,50	60,75	61,00	61,00
3.		Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan tingkat kepuasan masyarakat atas layanan publik dalam urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penanggulangan kebakaran	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) (Poin)	78,50	79,00	79,35	79,60	79,90	80,00
			Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Poin)	83,30	83,35	83,40	83,50	83,80	84,00

Rangkasbitung, Desember 2025
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan
Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak



YADI BASARI GUNAWAN, SE., M.Si.
Pembina Utama Muda / IVc.
NIP. 19751101 199503 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **DARTIM, S.Sos., M.Si.**

Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **GUNAWAN RUSMINTO, AP., M.Si.**

Jabatan : Pj. Bupati Lebak

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rangkasbitung, Januari 2025

Pihak Kedua



GUNAWAN RUSMINTO, AP., M.Si.

Pihak Pertama



DARTIM, S.Sos., M.Si.
NIP. 19690525 199009 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN LEBAK

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Mutu Pelayanan dalam bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Persentase Penegakkan Perda	Persen	92
2	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana kebakaran	Persentase Tingkat Waktu Tanggap (<i>Response Time Rate</i>) Daerah Layanan WMK Tepat Waktu	Persen	100
3	Meningkatnya Tata Kelola Pemerintahan Yang Baik	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	80
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	80

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 9.639.143.136,00	APBD
2. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 277.769.700,00	APBD
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp. 3.391.155.000,00	APBD

Rangkasbitung, Januari 2025

Pihak Kedua



GUNAWAN RUSMINTO, AP., M.Si.

Pihak Pertama



DARTIM, S.Sos., M.Si.
NIP. 19690525 199009 1 002



PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025

Dalam rangka mewujudkan Manajemen Pemerintahan yang efektif, transparan dan akuntabel serta berorientasi pada hasil, kami yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **YADI BASARI GUNAWAN, SE., M.Si.**

Jabatan : Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak
Selanjutnya disebut PIHAK PERTAMA

Nama : **MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA, SH.**

Jabatan : Bupati Lebak

Selaku atasan PIHAK PERTAMA, selanjutnya disebut PIHAK KEDUA

PIHAK PERTAMA berjanji akan mewujudkan target kinerja yang seharusnya sesuai dengan lampiran perjanjian ini, dalam rangka mencapai target kinerja jangka menengah seperti yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan. Keberhasilan dan kegagalan pencapaian target kinerja tersebut menjadi tanggungjawab kami.

PIHAK KEDUA akan melakukan supervisi yang diperlukan serta akan melakukan evaluasi terhadap capaian kinerja dari perjanjian ini dan akan mengambil tindakan yang diperlukan dalam rangka pemberian penghargaan dan sanksi.

Rangkasbitung, Desember 2025

Pihak Kedua



MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA, SH.

Pihak Pertama



YADI BASARI GUNAWAN, SE., M.Si.

Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19751101 199503 1 002

PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2025
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN LEBAK

NO	SASARAN STRATEGIS	INDIKATOR KINERJA	SATUAN	TARGET
1	Meningkatnya Penyelenggaraan Penegakan Perda dan Ketertiban Umum	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU)	Poin	74,00
2	Meningkatnya Pelayanan Penanggulangan kejadian Kebakaran di Daerah	Persentase Layanan Respon Cepat (<i>Response Time</i>) Penanggulangan Kejadian Kebakaran	Persen	60,00
3	Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan tingkat kepuasan masyarakat atas layanan publik dalam urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penanggulangan kebakaran	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	78,50
		Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	Poin	83,30

Program	Anggaran	Keterangan
1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ Kota	Rp. 9.155.071.106,00	APBD
2. Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Rp. 582.589.700,00	APBD
3. Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Rp. 3.594.564.800,00	APBD

Rangkasbitung, Desember 2025

Pihak Kedua



Pihak Pertama



MOCHAMAD HASBI ASYIDIKI JAYABAYA, SH. **YADI BASARI GUNAWAN, SE., M.Si.**
Pembina Utama Muda, IV/c
NIP. 19751101 199503 1 002

Nilai Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum (IPKKU)
Propinsi Banten Tahun 2025

Provinsi/Kabupaten/Kota	Penegakkan Perda	Penyelenggaraan Trantibum	Pemberdayaan SDM	Peningkatan Kapasitas SDM	Sarana dan Prasarana	Perencanaan dan Anggaran	Akuntabilitas	Strategi	SDM	Sistem	IPKKU	Kategori
Provinsi Banten	60,3267	48,5394	68,6431	40,0000	43,3925	50,0545	44,0300	52,4645	54,3216	46,8829	51,6330	Cukup Baik
Kabupaten Pandeglang	44,0848	55,8393	68,6431	44,4923	73,7806	58,3006	54,5883	51,9251	56,5677	61,2425	57,1070	Cukup Baik
Kabupaten Lebak	69,9131	92,1570	90,0717	35,5635	84,8869	84,9062	82,5320	84,7498	62,8176	84,3078	73,8651	Baik
Kabupaten Tangerang	85,6470	82,2344	90,0124	86,8460	94,9414	89,9375	94,1773	83,3708	88,4292	92,2484	88,6192	Sangat Baik
Kabupaten Serang	57,4490	72,6010	75,1331	37,7569	83,9188	84,9062	72,0100	67,5554	56,4450	81,4353	66,4418	Baik
Kota Tangerang	97,0211	94,0932	94,9386	86,8460	100,0000	100,0000	91,2515	95,0682	90,8923	97,8129	93,8784	Sangat Baik
Kota Cilegon	68,4942	66,4099	53,5100	35,5731	70,1382	53,1980	40,1574	67,1040	44,5415	54,1729	52,0139	Cukup Baik
Kota Serang	78,1104	91,5113	80,0000	40,0000	69,9246	74,8517	65,7792	87,0488	60,0000	71,3518	68,8974	Baik
Kota Tangerang Selatan	64,1437	64,9668	94,9386	80,2690	53,2822	84,9062	73,9466	64,6927	87,6038	74,2603	78,9042	Baik



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN

Jalan Abdi Negara No.1, Rangkasbitung Barat, Kode Pos 42312,
Laman: polpp-damkar.lebakkab.go.id, Pos-el: polpplebak@gmail.com

REKAPITULASI DATA
PENANGGULANGAN DAN PENYELAMATAN BENCANA KEBAKARAN DAN NON KEBAKARAN
DI KABUPATEN LEBAK TAHUN 2025

No.	Bulan	Penanggulangan Kebakaran					Penyelamatan Non Kebakaran					Penanggulangan Dan Penyelamatan					Response Time Rate			
		Tertanggulangi		Tidak		Jumlah Kejadian	Tertanggulangi		Tidak		Jumlah Kejadian	Tertanggulangi		Tidak		Jumlah Kejadian	Waktu (Menit)	Rerata (Menit)	Kejadian dalam waktu tanggap	%
		Jumlah	%	Jumlah	%		Jumlah	%	Jumlah	%		Jumlah	%	Jumlah	%					
1	2	3	4=(3/7)x100	5	6=(5/7)x100	7=3+5	8	9=(8/12)x100	10	11=(10/12)x100	12=8+10	13=3+8	14=(13/17)x100	15=5+10	16=(15/17)x100	17=13+15	18	19=18/7	20	21=(20/7)x100
1	JANUARI	4	80,00	1	20,00	5	17	94,44	1	5,56	18	21	91	2	8,70	23	55	11	4	80,00
2	FEBRUARI	5	83,33	1	16,67	6	17	100,00	-	-	17	22	95,65	1	4,35	23	104	17	4	66,67
3	MARET	1	100,00	-	-	1	19	100,00	-	-	19	20	100,00	0	-	20	21	21	0	-
4	APRIL	7	87,50	1	12,50	8	33	91,67	3	8,33	36	40	90,91	4	9,09	44	195	24	6	75,00
5	MEI	7	100,00	-	-	7	30	100,00	-	-	30	37	100,00	0	-	37	127	18	3	42,86
6	JUNI	3	60,00	2	40,00	5	19	100,00	-	-	19	22	91,67	2	8,33	24	120	24	3	60,00
7	JULI	3	75,00	1	-	4	20	100,00	-	-	20	23	95,83	1	4,17	24	76	19	3	75,00
8	AGUSTUS	7	77,78	2	-	9	17	100,00	-	-	17	24	92,31	2	7,69	26	141	16	7	77,78
9	SEPTEMBER	7	-	-	-	7	12	100,00	-	-	12	19	100,00	0	-	19	101	14	6	85,71
10	OKTOBER	4	-	3	-	7	20	-	-	-	20	24	88,89	3	11,11	27	274	39	4	57,14
11	NOVEMBER	7	-	1	-	8	12	-	4	-	16	19	79,17	5	20,83	24	134	17	7	87,50
12	DESEMBER	9	-	3	-	12	20	-	1	-	21	29	87,88	4	12,12	33	771	64	9	75,00
TOTAL		64	81,01	15	18,99	79	236	96	9	3,67	245	300	92,59	24	7,41	324	2119	27	56	70,89

Rangkasbitung, 02 Januari 2026
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan
Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak



YADI BASARI GUNAWAN, SE., M.Si.

Pembina Utama Muda, IV/a
NIP. 19751101 199503 1 002

LAPORAN HASIL EVALUASI

**Laporan Hasil Evaluasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi
Pemerintah Pada Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam
Kebakaran Kabupaten Lebak Tahun Anggaran 2024**

Nomor: 700/269/LHE/ITDA/III/2025

Tanggal 27 Maret 2025



PEMERINTAH KABUPATEN LEBAK

INSPEKTORAT DAERAH

Jalan Jenderal Soedirman 118 Rangkasbitung 42315 Telp : (0252) 203050 Fax : (0252) 203050
Email : inspektoratlebak@gmail.com Web : <http://inspektorat.lebakkab.go.id>

Rangkasbitung, 22 Maret 2025

Nomor : 700/269/WK/ITDA/III/2025
Lampiran : 1 (satu) Berkas
Perihal : Laporan Hasil Evaluasi
Sistem Akuntabilitas Kinerja
Instansi Pemerintah Satuan
Polisi Pamong Praja dan
Pemadam Kebakaran
(Satpol PP) Kabupaten
Lebak Tahun 2024

Kepada
Yth. Kepala Satuan Polisi Pamong
Praja dan Pemadam Kebakaran
(Satpol PP)
Kabupaten Lebak
di-
Tempat

Dalam rangka pelaksanaan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah, bersama ini kami sampaikan laporan perihal tersebut di atas.

Tujuan evaluasi ini adalah untuk menilai tingkat akuntabilitas atau pertanggungjawaban atas hasil (*outcome*) terhadap penggunaan anggaran dalam rangka terwujudnya pemerintah yang berorientasi kepada hasil (*result oriented government*) serta memberikan saran perbaikan yang diperlukan.

Evaluasi dilakukan terhadap 4 (empat) aspek manajemen kinerja yang meliputi: Perencanaan Kinerja, Pengukuran Kinerja, Pelaporan Kinerja, Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2024 merupakan salah satu dokumen yang dievaluasi selain

Rencana Strategis (Renstra), dokumen Rencana Kinerja Tahunan (Renja), dokumen Indikator Kinerja Utama dan dokumen Penetapan Kinerja (PK), serta dokumen terkait lainnya.

Hasil evaluasi yang dituangkan dalam bentuk nilai dengan kisaran mulai dari 0 sampai dengan 100. Adapun hasil evaluasi menunjukkan bahwa **Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP) Kabupaten Lebak** memperoleh nilai sebesar 78,95% dengan interpretasi predikat **BB (Sangat Baik)**. Penilaian tersebut menunjukkan terdapat gambaran bahwa AKIP sangat baik pada 2/3 unit kerja, baik itu unit kerja utama maupun unit kerja pendukung. Akuntabilitas yang sangat baik ditandai dengan mulai terwujudnya efisiensi penggunaan anggaran dalam mencapai kinerja, memiliki system manajemen kinerja yang andal dan berbasis teknologi informasi, serta pengukuran kinerja telah dilakukan sampai ke level eselon 3/koordinator. Rincian penilaian tersebut adalah sebagai berikut:

No	Komponen Yang Dievaluasi	Bobot Evaluasi	Nilai	
			2023	2024
1	Perencanaan Kinerja	30	26,10	26,10
2	Pengukuran Kinerja	25	22,50	21,60
3	Pelaporan Kinerja	15	9,75	11,25
4	Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal	25	20,00	20,00
Nilai Hasil Evaluasi		100	78,35	78,95
Hasil Evaluasi Akuntabilitas Kinerja			BB	BB

Beberapa catatan terkait dengan kualitas implementasi SAKIP di Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran (Satpol PP) Kabupaten Lebak adalah:

1. Laporan Kinerja belum menyajikan pencapaian tahun 2024 dengan target tahun 2024 di Renstra;
2. Laporan Kinerja belum menyajikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya;

3. Laporan kinerja belum menyajikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;
4. Laporan Kinerja belum menyajikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Berdasarkan uraian di atas serta dalam rangka lebih mengefektifkan penerapan budaya kinerja, kami merekomendasikan sebagai berikut:

1. Agar Laporan Kinerja menyajikan pencapaian tahun 2024 dengan target tahun 2024 di Renstra;
2. Agar Laporan Kinerja menyajikan penyebab keberhasilan/kegagalan atau peningkatan/ penurunan kinerja serta alternative solusi yang telah dilakukan;
3. Agar Laporan kinerja menyajikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;
4. Agar Laporan Kinerja menyajikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Demikian kami sampaikan hasil evaluasi ini. Kami menghargai upaya Saudara beserta seluruh jajaran dalam menerapkan manajemen kinerja di lingkungan instansi Saudara. Terima kasih atas perhatian dan kerjasamanya.

**INSPEKTUR INSPEKTORAT DAERAH
KABUPATEN LEBAK,**



Dr. H. Rusito, S.Sos., M.Si
Pembina Utama Muda
NIP. 197101101992023003

Tembusan :

1. Yth. Bupati Lebak (sebagai laporan);
2. Yth. Sekretaris Daerah.

**BERITA ACARA TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN KINERJA/EVALUASI AKIP
PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024**

Pada hari ini **selasa** tanggal **tujuh belas** bulan **juni** tahun **Dua Ribu Dua Puluh Lima**, kami:

1. Tim Quality Assurance SAKIP Tingkat Pemda/Pendamping (coachingclinic):

Nama	: Hadi Mulyawan, M.H.
NIP	: 19750102 200502 1 004
Jabatan	: Auditor Madya
Nama	: Iwan Gustiawan, S.E.
NIP	: 19740805 200502 1 001
Jabatan	: PPUPD Madya
Nama	: Haris Perdana, S.P.
NIP	: 19801012 200502 1 004
Jabatan	: Kepala Bidang P2EPD
Nama	: Ovik Heryawan, S.Sos., M.Si.
NIP	: 19801208 200502 1 005
Jabatan	: Ahli Muda - Perencana
Nama	: Fahmi Rizal, S.E.
NIP	: 19940420 202012 1 014
Jabatan	: Ahli Pertama – Perencana
Nama	: Yogi Sabarudin Umbara, S.E
NIP	: 19960125 202203 1 006
Jabatan	: Ahli Pertama – Perencana

Selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KESATU"

2. Nama : DARTIM, S.Sos., M.Si.
Jabatan : Kepala Satuan
Perangkat Daerah : Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran

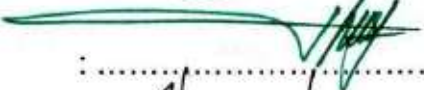
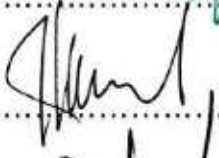
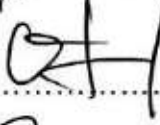
Selanjutnya disebut sebagai "PIHAK KEDUA"

Pihak Kesatu dan Kedua telah mengadakan pembahasan bersama mengenai tindak lanjut atas laporan kinerja/evaluasi AKIP Perangkat Daerah Tahun 2024, yang meliputi :

1. Laporan Kinerja belum menyajikan pencapaian Tahun 2024 dengan target Tahun 2024 di Renstra;
2. Laporan Kinerja belum menyajikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya;
3. Laporan Kinerja belum menyajikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja;
4. Laporan Kinerja belum menyajikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja).

Adapun tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi AKIP oleh Perangkat Daerah Tahun 2024 tertuang dalam lampiran Berita Acara Ini.

Rangkasbitung, 17 Juni 2025
Tim QA Sakip Pemda :

1. Hadi Mulyawan, M.H. : 
2. Iwan Gustiawan, S.E. : 
3. Haris Perdana, S.P : 
4. Ovik Heryawan, S.Sos., M.Si. : 
5. Fahmi Rizal, S.E. : 
6. Yogi Sabarudin Umbara, S.E : 

Kepala Satuan Polisi Pamong Praja
Dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Lebak



DARTIM, S.Sos., M.Si.
NIP. 19690525 199009 1 002

Mengetahui,
Ketua Tim QA Sakip,



Dr. Yosep Mohamad Holis, S.Hut., MT., M.Sc
NIP. 19751221 200003 1 002

LAMPIRAN BERITA ACARA TINDAK LANJUT ATAS LAPORAN KINERJA/EVALUASI AKIP PERANGKAT DAERAH TAHUN 2024
SATUAN KERJA PERANGKAT DAERAH : SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN LEBAK

No	Rekomendasi Hasil Evaluasi AKIP Tahun 2024	Tindak Lanjut	Status/Progres Penyelesaian (selesai/belum selesai)	Kondisi Terkini	Masalah yang dihadapi	Link Eviden
1	Laporan Kinerja belum menyajikan pencapaian Tahun 2024 dengan target Tahun 2024 di Renstra	Laporan Kinerja dilengkapi dengan pencapaian Tahun 2024 dengan target Tahun 2024 di Renstra	Selesai	Laporan Kinerja menyajikan pencapaian Tahun 2024 dengan target Tahun 2024 di RPJMD	-	https://drive.google.com/file/d/1pfHToXZ06qtE9HmwHempHHgpdI-Kzj2-/view?usp=sharing
2	Laporan Kinerja belum menyajikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya	Laporan Kinerja dilengkapi dengan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya	Selesai	Laporan Kinerja menyajikan kualitas atas capaian kinerja beserta upaya nyata dan/atau hambatannya	-	https://drive.google.com/file/d/1SAPtszvKw0ve6PTDrhlhul9FGJs6t5nG/viiew?usp=sharing
3	Laporan Kinerja belum menyajikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja	Laporan Kinerja dilengkapi dengan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja	Selesai	Laporan Kinerja menyajikan efisiensi atas penggunaan sumber daya dalam mencapai kinerja	-	https://drive.google.com/file/d/1_AodZ_xXKiPN_UjLDoJYBiP1N4u8ht3I/viiew?usp=sharing
4	Laporan Kinerja belum menyajikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)	Laporan Kinerja dilengkapi dengan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)	Selesai	Laporan Kinerja belum menyajikan upaya perbaikan dan penyempurnaan kinerja ke depan (rekomendasi perbaikan kinerja)	-	https://drive.google.com/file/d/1r4zc-3dWduhgOQSvMPlqkO2SduOn4st0/view?usp=sharing

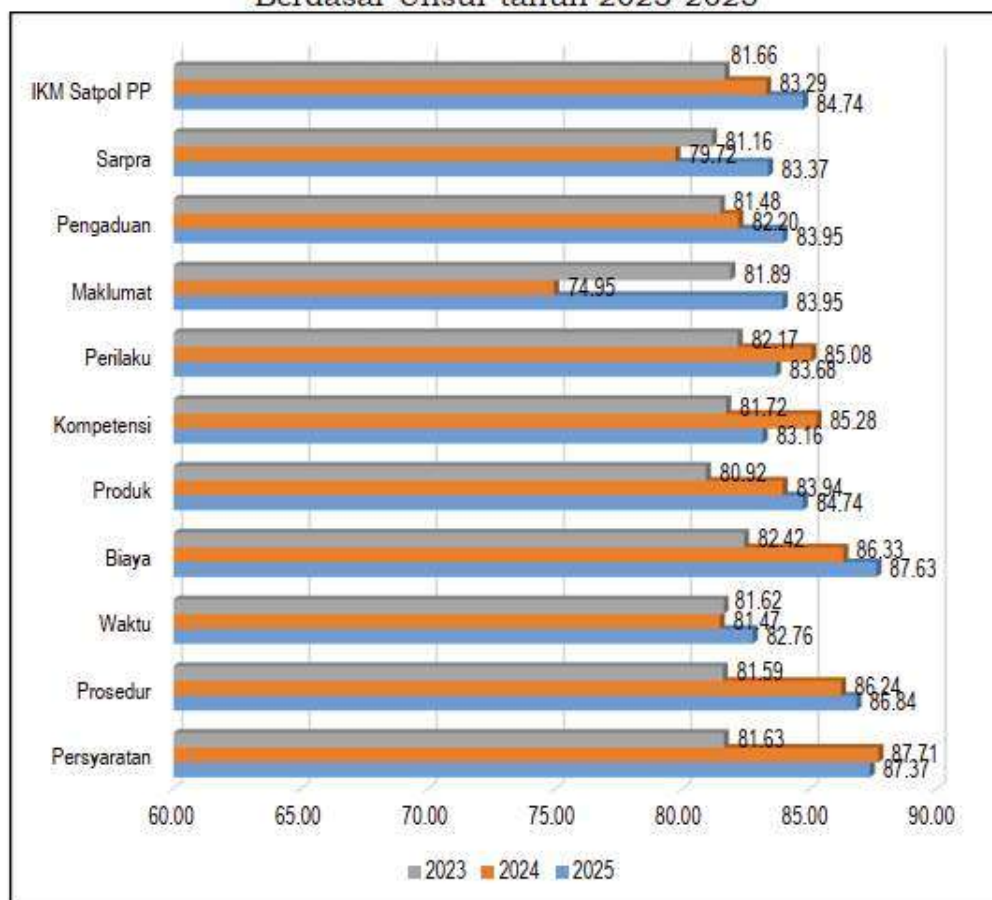
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan
Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak


DARTIM, S.Sos., M.Si.
NIP. 19690525 199009 1 002

30. IKM Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran

Tingkat kepuasan Masyarakat terhadap Satpol PP dan Damkar pada tahun 2025 terkategori baik dengan indeks sebesar 84,74 dengan mutu pelayanan B. Capaian ini tercatat mengalami peningkatan yang signifikan jika dibandingkan dengan tahun 2024. Dengan menggunakan indeks unit IKM Satpol PP dan Damkar sebesar 84,74 sebagai *threshold*, maka terdapat 6 unsur yang berkinerja di bawah indeks unit IKM Satpol PP dan Damkar yaitu waktu pelayanan, kompetensi petugas, perilaku petugas, maklumat pelayanan, pengelolaan pengaduan serta sarana dan prasarana sebagaimana dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 4.70
IKM Satpol PP dan Damkar
Berdasar Unsur tahun 2023-2025



Sumber: Hasil Penelitian diolah, 2025

Dilihat dari grafik di atas, secara umum kepuasan masyarakat terhadap pelayanan yang diberikan oleh Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak mendapatkan penilaian baik atau memuaskan. Meski demikian masih terdapat 6 unsur yang berkinerja di bawah IKM unit Satpol PP dan Damkar. Selain itu terdapat 3 unsur yang mengalami penurunan nilai indeks jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya yakni unsur persyaratan pelayanan dari yang semula 87,71 turun menjadi 87,37 pada tahun 2025; unsur kompetensi petugas dari yang semula 85,28 turun menjadi 83,16 pada tahun 2025 dan unsur perilaku petugas yang semula 85,08 turun menjadi 83,68 pada tahun 2025. Namun, masyarakat masih memberikan apresiasi memuaskan pada ketiga unsur tersebut dengan mutu pelayanan B.

Peningkatan nilai indeks pada unit IKM Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak juga dibarengi dengan peningkatan nilai indeks dari 7 unsur pembentuk IKM Satpol PP dan Damkar Kabupaten Lebak yakni prosedur pelayanan, waktu pelayanan, biaya pelayanan, produk pelayanan, maklumat pelayanan, pengelolaan pengaduan serta sarana dan prasarana pelayanan. Secara umum masyarakat juga memberikan apresiasi positif pada 31 indikator komposit dari setiap unsur dengan mutu pelayanan B.

Upaya optimalisasi perlu dilakukan pada indikator dengan indeks terendah pada beberapa unsur. Pertama adalah upaya optimalisasi pada unsur sarana dan prasarana pelayanan terutama pada indikator komposit kebersihan toilet umum dan efektivitas larangan merokok. Upaya optimalisasi kedua adalah pada unsur perilaku petugas pelaksana terutama pada indikator komposit kesantunan dari petugas pelaksana. Kemudian pada unsur maklumat pelayanan juga diperlukan optimalisasi terutama pada indikator komposit integritas terhadap maklumat pelayanan.

Tabel 4.63
IKM Satpol PP dan Damkar
Berdasar Indikator Komposit Tahun 2025

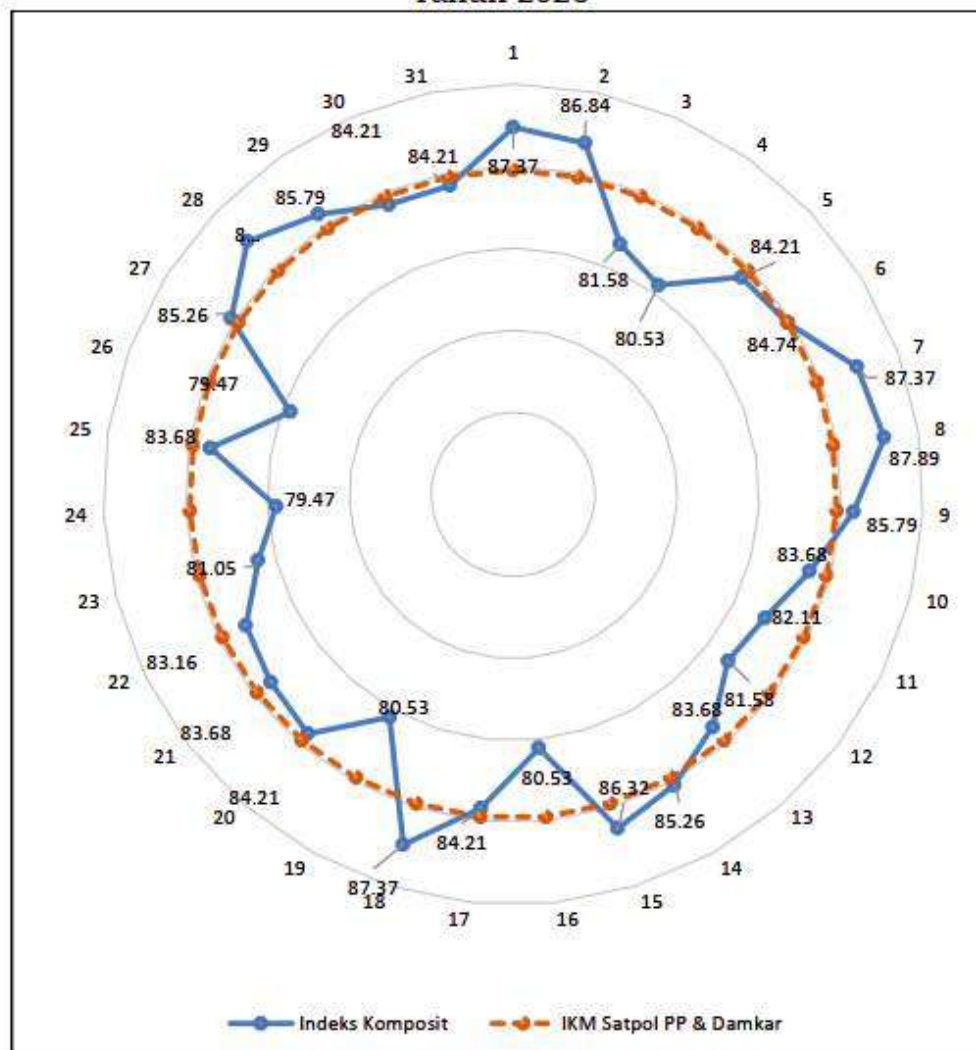
No.	Indikator	Indeks	Mutu	Keterangan
1	Kemudahan Persyaratan	87,37	B	Di atas rerata
2	Kemudahan Prosedur	86,84	B	Di atas rerata
3	Ketepatan Waktu Buka Pelayanan	81,58	B	Di bawah rerata
4	Ketepatan Waktu Istirahat	80,53	B	Di bawah rerata
5	Ketepatan Waktu Tutup Pelayanan	84,21	B	Di bawah rerata
6	Ketepatan Waktu Tunggu Pelayanan	84,74	B	Di bawah rerata
7	Kewajaran Biaya	87,37	B	Di atas rerata
8	Biaya Tambahan	87,89	B	Di atas rerata
9	Produk Sesuai Harapan	85,79	B	Di atas rerata
10	Angka Komplain	83,68	B	Di bawah rerata
11	Keterampilan Petugas	82,11	B	Di bawah rerata
12	Kemampuan Kominfo	81,58	B	Di bawah rerata
13	Pengalaman Petugas	83,68	B	Di bawah rerata
14	Responsivitas Petugas	85,26	B	Di atas rerata
15	Non Diskriminasi	86,32	B	Di atas rerata
16	Kesantunan	80,53	B	Di bawah rerata
17	Keramahan	84,21	B	Di bawah rerata
18	Keberadaan Maklumat Pelayanan	87,37	B	Di atas rerata
19	Integritas Maklumat Pelayanan	80,53	B	Di bawah rerata
20	Ketersediaan Sarana Pengaduan	84,21	B	Di bawah rerata
21	Respon Pengaduan Sesuai Harapan	83,68	B	Di bawah rerata
22	Kebersihan Lingkungan	83,16	B	Di bawah rerata
23	Kenyamanan Ruang Pelayanan	81,05	B	Di bawah rerata
24	Kebersihan Toilet Umum	79,47	B	Di bawah rerata
25	Ketersediaan APAR	83,68	B	Di bawah rerata
26	Efektivitas Larangan Merokok	79,47	B	Di bawah rerata
27	Sarpra Tdk Membahayakan	85,26	B	Di atas rerata
28	Keamanan	87,37	B	Di atas rerata
29	Ketersediaan Sarpra Afirmasi	85,79	B	Di atas rerata
30	Ketersediaan Rambu-rambu Mitigasi Bencana	84,21	B	Di bawah rerata
31	Ketersediaan Pely. Online	84,21	B	Di bawah rerata

Sumber: Hasil Penelitian diolah, 2025

Berdasar tabel di atas diperoleh informasi bahwa 31 dari 31 indikator berkualifikasi B. Adapun dari 31 indikator tersebut, terdapat 11 indikator telah mencapai di atas indeks unit IKM Satpol PP dan Damkar yakni sebesar 84,74 dan sebanyak 20 indikator

belum mencapai IKM Satpol PP dan Damkar. Informasi detail tentang postur pelayanan publik ini dapat dilihat pada grafik berikut.

Grafik 4.71
Postur Pelayanan Publik Satpol PP dan Damkar
Tahun 2025



Sumber: Hasil Penelitian Diolah, 2025
Keterangan: Lihat keterangan nama indikator 1, 2, 3 dst
pada Pedoman hal xiv

Irregularitas bentuk kurve yang terbentuk dari indikator komposit sebagaimana tampak pada grafik di atas, juga dengan luasan kurve yang cenderung kurang optimum dan kurang

seimbang antar indikatornya, mencerminkan postur pelayanan publik yang kurang ideal karena masih tampak diskrepansi kinerja antar indikatornya yang sangat nyata. Karenanya fokus perbaikan perlu diarahkan pada upaya meningkatkan sekaligus menyeimbangkan kinerja indikator-indikator kompositnya tersebut.

Indeks kepuasan masyarakat pada pelayanan yang diberikan oleh Satpol PP dan Damkar mengalami peningkatan cukup signifikan baik dari peningkatan indeks pada unsur komposit maupun indikator kompositnya. Untuk dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik, maka Satpol PP dan Damkar perlu melakukan beberapa rekomendasi tindak lanjut berdasarkan indikator komposit dari 3 unsur.

Rekomendasi tindak lanjut pertama adalah pada unsur sarana dan prasarana pelayanan terutama pada indikator kebersihan toilet umum. Satpol PP dan Damkar perlu menerapkan SOP kebersihan toilet dengan melakukan pengecekan toilet dan melakukan ceklist harian oleh petugas kebersihan. Selain itu, perlu ada himbauan tertulis terkait kewajiban menjaga kebersihan toilet yang dipasang agar pengguna layanan dapat turut menjaga kebersihan toilet. Kemudian Satpol PP dan Damkar juga perlu menegakkan aturan areabebas rokok dengan memasang rambularangan di seluruh area pelayanan disertai dengan sanksi tegas kepada petugas atau pengguna layanan yang melakukan pelanggaran. Petugas khusus juga perlu ditugaskan untuk melakukan patrol dan memonitoring agar tidak ada pihak yang merokok di area bebas rokok.

Rekomendasi tindak lanjut kedua adalah optimalisasi pada unsur perilaku petugas pelaksana terutama pada indikator komposit kesantunan petugas. Satpol PP dan Damkar perlu melakukan pelatihan etika dan komunikasi kepada petugas pelayanan dengan memberikan pelatihan internal dalam situasi

sulit yang relevan dengan situasi yang dihadapi dari tugas Satpol PP dan Damkar. Kemudian budaya 5S (Senyum, Salam, Sapa, Sopan dan Santun) juga perlu diimplementasikan di lingkungan kerja.

Rekomendasi ketiga adalah optimalisasi pada unsur maklumat pelayanan terutama pada indikator komposit integritas maklumat pelayanan. Satpol PP dan Damkar perlu melakukan audit maklumat pelayanan dengan cara melakukan audit silang antara janji pelayanan dalam maklumat dengan implementasi pelayanan pada kondisi faktual. Satpol PP dan Damkar juga perlu memastikan bahwa maklumat pelayanan benar dipahami dan diimplementasikan oleh seluruh elemen petugas layanan. Pimpinan dalam hal ini juga perlu secara rutin mengingatkan petugas pelayanan untuk mengimplementasikan maklumat pelayanan, baik melalui beragam rapat, apel pagi maupun saat briefing tugas.

Tabel 4.64
Rekomendasi Rencana Aksi untuk Satpol PP dan Damkar

NO	Unsur dan Indikator	Rekomendasi
1	Waktu pelayanan	▪ Melakukan <i>briefing</i> sebelum pelaksanaan tugas untuk memotivasi dan mengecek kesiapan petugas ▪ Mengefektifkan waktu pelayanan yang terbatas dengan penambahan produktivitas atau penambahan petugas pelayanan sehingga kapasitas layanan menjadi normal atau mendekati kondisi normal; ▪ Meningkatkan pengawasan dari pimpinan terutama pada ketepatan waktu pelayanan.
2	Kompetensi Petugas Pelayanan	▪ Mengefektifkan fungsi supervisi pelaksanaan tugas oleh petugas. ▪ Mengefektifkan fungsi monitoring untuk mengidentifikasi masalah dalam pelaksanaan pelayanan ▪ Melaksanakan/mengikuti BinteK yang relevan dengan kebutuhan lapangan
3	Perilaku Petugas Pelayanan	▪ Melakukan <i>briefing</i> setiap pagi sebelum pelaksanaan tugas untuk memotivasi dan mengecek kesiapan petugas

NO	Unsur dan Indikator	Rekomendasi
		▪ Menyusun dan menerapkan SOP tentang penerapan 3S (Salam, Senyum, dan Sapa) bagi petugas pelayanan ▪ Mengikuti Bintek tentang Pelayanan Prima bagi petugas pelayanan ▪ Menginternalisasi tugas tambahan bagi setiap petugas untuk mengingatkan pengguna layanan.
4	Sarana dan Prasarana	▪ Mengefektifkan kinerja petugas kebersihan kantor ▪ Membentuk tim / petugas piket harian / mingguan. ▪ Menyediakan ragam perlengkapan standar gedung perkantoran, seperti: APAR, tempat sampah, fasilitas ruang tunggu, dll ▪ Mengefektifkan petugas keamanan kantor; ▪ Melakukan opname kelayakan sarana dan prasarana penunjang pelayanan ▪ Menata ulang lingkungan pelayanan agar tampak asri dan nyaman ▪ Menyediakan sarana afirmasi bagi disabilitas, ibu hamil, menyusui, lansia dan anak-anak. ▪ Mengefektifkan larangan merokok di ruang tunggu dan pelayanan. ▪ Mengaktivasi pelayanan online secara optimal.

Sumber: Hasil Penelitian Diolah, 2025



PEMERINTAHAN KAB. LEBAK
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
LAPORAN REALISASI ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025
01 Januari 2025 Sampai 31 Desember 2025



Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
1	2	3	4	5 = (4/3)*100	6
5	BELANJA DAERAH	13.332.225.606,00	12.818.234.367,00	96,14	9.364.516.047,00
5.1	BELANJA OPERASI	10.040.970.606,00	9.555.116.467,00	95,16	9.285.780.047,00
5.1.01	Belanja Pegawai	4.817.952.326,00	4.471.381.217,00	92,80	4.635.060.092,00
5.1.01.01	Belanja Gaji dan Tunjangan ASN	3.086.852.326,00	2.829.767.217,00	91,67	2.763.576.592,00
5.1.01.01.01	Belanja Gaji Pokok ASN	2.157.532.115,00	1.989.852.180,00	92,22	1.993.957.200,00
5.1.01.01.01.0001	Belanja Gaji Pokok PNS	2.028.126.115,00	1.860.446.180,00	91,73	1.959.651.600,00
5.1.01.01.01.0002	Belanja Gaji Pokok PPPK	129.406.000,00	129.406.000,00	100,00	34.305.600,00
5.1.01.01.02	Belanja Tunjangan Keluarga ASN	262.031.856,00	238.329.092,00	90,95	235.986.106,00
5.1.01.01.02.0001	Belanja Tunjangan Keluarga PNS	247.780.544,00	224.249.324,00	90,50	231.526.378,00
5.1.01.01.02.0002	Belanja Tunjangan Keluarga PPPK	14.251.312,00	14.079.768,00	98,79	4.459.728,00
5.1.01.01.03	Belanja Tunjangan Jabatan ASN	117.210.000,00	96.110.000,00	81,99	123.970.000,00
5.1.01.01.03.0001	Belanja Tunjangan Jabatan PNS	117.210.000,00	96.110.000,00	81,99	123.970.000,00
5.1.01.01.04	Belanja Tunjangan Fungsional ASN	63.840.000,00	63.840.000,00	100,00	18.960.000,00
5.1.01.01.04.0001	Belanja Tunjangan Fungsional PNS	63.840.000,00	63.840.000,00	100,00	18.960.000,00
5.1.01.01.05	Belanja Tunjangan Fungsional Umum ASN	66.260.000,00	66.260.000,00	100,00	70.990.000,00
5.1.01.01.05.0001	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PNS	57.950.000,00	57.950.000,00	100,00	68.830.000,00
5.1.01.01.05.0002	Belanja Tunjangan Fungsional Umum PPPK	8.310.000,00	8.310.000,00	100,00	2.160.000,00
5.1.01.01.06	Belanja Tunjangan Beras ASN	149.547.300,00	139.191.240,00	93,07	137.091.060,00
5.1.01.01.06.0001	Belanja Tunjangan Beras PNS	139.118.820,00	128.980.020,00	92,71	134.049.420,00
5.1.01.01.06.0002	Belanja Tunjangan Beras PPPK	10.428.480,00	10.211.220,00	97,91	3.041.640,00
5.1.01.01.07	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus ASN	95.575.746,00	87.554.776,00	91,60	33.353.999,00
5.1.01.01.07.0001	Belanja Tunjangan PPh/Tunjangan Khusus PNS	95.575.746,00	87.554.776,00	91,60	33.353.999,00
5.1.01.01.08	Belanja Pembulatan Gaji ASN	42.093,00	27.604,00	65,57	25.834,00
5.1.01.01.08.0001	Belanja Pembulatan Gaji PNS	37.805,00	24.118,00	63,79	24.874,00
5.1.01.01.08.0002	Belanja Pembulatan Gaji PPPK	4.288,00	3.486,00	81,29	960,00
5.1.01.01.09	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN	152.090.154,00	132.105.696,00	86,86	132.945.559,00
5.1.01.01.09.0001	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PNS	146.556.954,00	126.579.545,00	86,36	131.308.549,00
5.1.01.01.09.0002	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan PPPK	5.533.200,00	5.526.151,00	99,87	1.637.010,00
5.1.01.01.10	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN	4.527.840,00	4.124.154,00	91,08	4.074.194,00
5.1.01.01.10.0001	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PNS	4.244.700,00	3.841.020,00	90,48	3.991.862,00
5.1.01.01.10.0002	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja PPPK	283.140,00	283.134,00	99,99	82.332,00
5.1.01.01.11	Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN	13.582.956,00	12.372.475,00	91,08	12.222.640,00
5.1.01.01.11.0001	Belanja Iuran Jaminan Kematian PNS	12.733.560,00	11.523.091,00	90,49	11.975.644,00
5.1.01.01.11.0002	Belanja Iuran Jaminan Kematian PPPK	849.396,00	849.384,00	99,99	246.996,00
5.1.01.01.12	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat ASN	4.612.266,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0001	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PNS	4.263.660,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.01.12.0002	Belanja Iuran Simpanan Peserta Tabungan Perumahan Rakyat PPPK	348.606,00	0,00	0,00	0,00
5.1.01.02	Belanja Tambahan Penghasilan ASN	1.731.100.000,00	1.641.614.000,00	94,83	1.711.253.500,00
5.1.01.02.01	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN	1.731.100.000,00	1.641.614.000,00	94,83	1.711.253.500,00
5.1.01.02.01.0001	Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja PNS	1.731.100.000,00	1.641.614.000,00	94,83	1.711.253.500,00
5.1.01.03	Tambahan Penghasilan berdasarkan Pertimbangan Objektif Lainnya ASN	0,00	0,00	0,00	160.230.000,00
5.1.01.03.07	Belanja Honorarium	0,00	0,00	0,00	160.230.000,00
5.1.01.03.07.0001	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	0,00	0,00	0,00	160.230.000,00
5.1.02	Belanja Barang dan Jasa	5.223.018.280,00	5.083.735.250,00	97,33	4.650.719.955,00
5.1.02.01	Belanja Barang	421.717.160,00	392.458.180,00	93,06	616.759.000,00
5.1.02.01.01	Belanja Barang Pakai Habis	421.717.160,00	392.458.180,00	93,06	616.759.000,00
5.1.02.01.01.0004	Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas	0,00	0,00	0,00	428.850.000,00
5.1.02.01.01.0012	Belanja Bahan-Bahan Lainnya	9.800.000,00	4.450.000,00	45,40	6.900.000,00
5.1.02.01.01.0024	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor	10.754.000,00	7.771.000,00	72,26	19.499.000,00
5.1.02.01.01.0025	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor- Kertas dan Cover	6.318.000,00	6.090.000,00	96,39	13.847.000,00
5.1.02.01.01.0027	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Benda Pos	1.690.000,00	1.676.500,00	99,20	1.200.000,00
5.1.02.01.01.0029	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Komputer	7.820.000,00	7.630.250,00	97,57	8.385.000,00
5.1.02.01.01.0030	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perabot Kantor	21.172.660,00	18.537.500,00	87,55	9.125.000,00
5.1.02.01.01.0032	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas	15.382.000,00	14.482.170,00	94,15	0,00
5.1.02.01.01.0036	Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya	20.846.500,00	19.654.650,00	94,28	8.460.000,00
5.1.02.01.01.0052	Belanja Makanan dan Minuman Rapat	172.652.000,00	163.134.000,00	94,48	111.181.000,00
5.1.02.01.01.0053	Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu	9.614.000,00	8.172.000,00	85,00	4.482.000,00
5.1.02.01.01.0064	Belanja Pakaian Dinas Lapangan (PDL)	128.000.000,00	124.177.920,00	97,01	4.830.000,00
5.1.02.01.01.0076	Belanja Pakaian Olahraga	17.668.000,00	16.682.190,00	94,42	0,00
5.1.02.02	Belanja Jasa	3.715.323.620,00	3.620.104.184,00	97,43	3.463.473.556,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.1.02.02.01	Belanja Jasa Kantor	3.567.365.700,00	3.472.174.344,00	97,33	3.320.340.670,00
5.1.02.02.01.0001	Belanja Jasa Pengelolaan BMD yang Tidak Menghasilkan Pendapatan	6.600.000,00	6.600.000,00	100,00	6.480.000,00
5.1.02.02.01.0008	Honorarium Tim Penyusunan Jurnal, Buletin, Majalah, Pengelola Teknologi Informasi dan Pengelola Website	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0017	Belanja Jasa Tenaga Ketenteraman, Ketertiban Umum, dan Perlindungan Masyarakat	3.142.538.400,00	3.097.255.860,00	98,55	2.719.474.600,00
5.1.02.02.01.0018	Belanja Jasa Tenaga Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan	0,00	0,00	0,00	48.000.000,00
5.1.02.02.01.0026	Belanja Jasa Tenaga Administrasi	0,00	0,00	0,00	158.400.000,00
5.1.02.02.01.0027	Belanja Jasa Tenaga Operator Komputer	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.01.0029	Belanja Jasa Tenaga Ahli	25.000.000,00	25.000.000,00	100,00	25.000.000,00
5.1.02.02.01.0055	Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan	13.500.000,00	8.598.700,00	63,69	5.500.000,00
5.1.02.02.01.0061	Belanja Tagihan Listrik	28.823.780,00	23.923.216,00	82,99	25.719.830,00
5.1.02.02.01.0062	Belanja Langganan Jurnal/Surat Kabar/Majalah	5.760.000,00	5.090.000,00	88,36	0,00
5.1.02.02.01.0063	Belanja Kawat/Faksimili/Internet/TV Berlangganan	25.133.520,00	24.736.568,00	98,42	79.179.340,00
5.1.02.02.01.0067	Belanja Pembayaran Pajak, Bea, dan Perizinan	46.300.000,00	22.260.000,00	48,07	19.606.900,00
5.1.02.02.01.0071	Belanja Lembur	75.180.000,00	72.280.000,00	96,14	232.980.000,00
5.1.02.02.01.0080	Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan	194.530.000,00	182.430.000,00	93,77	0,00
5.1.02.02.02	Belanja Iuran Jaminan/Asuransi	145.957.920,00	145.929.840,00	99,98	143.132.886,00
5.1.02.02.02.0005	Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN	129.433.920,00	129.433.920,00	100,00	127.014.966,00
5.1.02.02.02.0006	Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN	7.344.000,00	7.331.520,00	99,83	7.163.520,00
5.1.02.02.02.0007	Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN	9.180.000,00	9.164.400,00	99,83	8.954.400,00
5.1.02.02.12	Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.02.12.0002	Belanja Sosialisasi	2.000.000,00	2.000.000,00	100,00	0,00
5.1.02.03	Belanja Pemeliharaan	705.337.500,00	690.945.886,00	97,95	175.038.981,00
5.1.02.03.02	Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin	661.561.500,00	648.981.486,00	98,09	155.263.981,00
5.1.02.03.02.0035	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan	581.601.500,00	570.275.672,00	98,05	55.797.500,00
5.1.02.03.02.0038	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Beroda Dua	0,00	0,00	0,00	14.550.000,00
5.1.02.03.02.0040	Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Bermotor Khusus	60.000.000,00	59.907.920,00	99,84	71.393.481,00
5.1.02.03.02.0117	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Kantor-Alat Kantor Lainnya	3.600.000,00	3.263.844,00	90,66	1.915.000,00
5.1.02.03.02.0121	Belanja Pemeliharaan Alat Kantor dan Rumah Tangga-Alat Rumah Tangga-Alat Pendingin	4.270.000,00	3.973.200,00	93,04	1.890.000,00
5.1.02.03.02.0405	Belanja Pemeliharaan Komputer-Komputer Unit-Personal Computer	12.090.000,00	11.560.850,00	95,62	2.161.000,00
5.1.02.03.02.0409	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Personal Computer	0,00	0,00	0,00	2.377.000,00
5.1.02.03.02.0410	Belanja Pemeliharaan Komputer-Peralatan Komputer-Peralatan Jaringan	0,00	0,00	0,00	5.180.000,00
5.1.02.03.03	Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan	43.776.000,00	41.964.400,00	95,86	19.775.000,00
5.1.02.03.03.0001	Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor	43.776.000,00	41.964.400,00	95,86	19.775.000,00
5.1.02.04	Belanja Perjalanan Dinas	380.640.000,00	380.227.000,00	99,89	395.448.418,00
5.1.02.04.01	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri	380.640.000,00	380.227.000,00	99,89	395.448.418,00
5.1.02.04.01.0001	Belanja Perjalanan Dinas Biasa	33.640.000,00	33.227.000,00	98,77	67.488.418,00
5.1.02.04.01.0003	Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota	347.000.000,00	347.000.000,00	100,00	327.960.000,00
	JUMLAH BELANJA OPERASI	10.040.970.606,00	9.555.116.467,00	95,16	9.285.780.047,00
5.2	BELANJA MODAL	3.291.255.000,00	3.263.117.900,00	99,14	78.736.000,00
5.2.02	Belanja Modal Peralatan dan Mesin	3.291.255.000,00	3.263.117.900,00	99,14	78.736.000,00
5.2.02.02	Belanja Modal Alat Angkutan	3.000.000.000,00	2.977.020.000,00	99,23	0,00
5.2.02.02.01	Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor	3.000.000.000,00	2.977.020.000,00	99,23	0,00
5.2.02.02.01.0006	Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus	3.000.000.000,00	2.977.020.000,00	99,23	0,00
5.2.02.03	Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur	65.500.000,00	64.990.500,00	99,22	0,00
5.2.02.03.02	Belanja Modal Alat Bengkel Tak Bermesin	65.500.000,00	64.990.500,00	99,22	0,00
5.2.02.03.02.0012	Belanja Modal Peralatan Bengkel Khusus Peladam	65.500.000,00	64.990.500,00	99,22	0,00
5.2.02.04	Belanja Modal Alat Pertanian	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
5.2.02.04.01	Belanja Modal Alat Pengolahan	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
5.2.02.04.01.0009	Belanja Modal Alat-Alat Peternakan	0,00	0,00	0,00	1.150.000,00
5.2.02.05	Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga	84.875.000,00	83.565.000,00	98,45	32.830.000,00
5.2.02.05.01	Belanja Modal Alat Kantor	4.500.000,00	4.200.000,00	93,33	0,00
5.2.02.05.01.0005	Belanja Modal Alat Kantor Lainnya	4.500.000,00	4.200.000,00	93,33	0,00
5.2.02.05.02	Belanja Modal Alat Rumah Tangga	80.375.000,00	79.365.000,00	98,74	23.600.000,00
5.2.02.05.02.0001	Belanja Modal Mebel	0,00	0,00	0,00	3.600.000,00
5.2.02.05.02.0004	Belanja Modal Alat Pendingin	0,00	0,00	0,00	4.200.000,00
5.2.02.05.02.0007	Belanja Modal Alat Pemadam Kebakaran	80.375.000,00	79.365.000,00	98,74	15.800.000,00
5.2.02.05.03	Belanja Modal Meja dan Kursi Kerja/Rapat Pejabat	0,00	0,00	0,00	9.230.000,00
5.2.02.05.03.0001	Belanja Modal Meja Kerja Pejabat	0,00	0,00	0,00	9.230.000,00
5.2.02.10	Belanja Modal Komputer	30.000.000,00	28.651.400,00	95,50	34.600.000,00
5.2.02.10.01	Belanja Modal Komputer Unit	23.000.000,00	22.058.000,00	95,90	31.600.000,00
5.2.02.10.01.0002	Belanja Modal Personal Computer	23.000.000,00	22.058.000,00	95,90	31.600.000,00
5.2.02.10.02	Belanja Modal Peralatan Komputer	7.000.000,00	6.593.400,00	94,19	3.000.000,00
5.2.02.10.02.0003	Belanja Modal Peralatan Personal Computer	7.000.000,00	6.593.400,00	94,19	3.000.000,00

Kode Rekening	URAIAN	ANGGARAN 2025	REALISASI 2025	% 2025	REALISASI 2024
5.2.02.15	Belanja Modal Alat Keselamatan Kerja	110.880.000,00	108.891.000,00	98,20	10.156.000,00
5.2.02.15.02	Belanja Modal Alat Pelindung	110.880.000,00	108.891.000,00	98,20	0,00
5.2.02.15.02.0001	Belanja Modal Baju Pengaman	110.880.000,00	108.891.000,00	98,20	0,00
5.2.02.15.03	Belanja Modal Alat SAR	0,00	0,00	0,00	10.156.000,00
5.2.02.15.03.0001	Belanja Modal Alat Penolong	0,00	0,00	0,00	10.156.000,00
	JUMLAH BELANJA MODAL	3.291.255.000,00	3.263.117.900,00	99,14	78.736.000,00
	JUMLAH BELANJA	13.332.225.606,00	12.818.234.367,00	96,14	9.364.516.047,00
	SURPLUS/DEFISIT	(13.332.225.606,00)	(12.818.234.367,00)	96,14	(9.364.516.047,00)

Kab. Lebak, 31 Desember 2025
**KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
 PEMADAM KEBAKARAN**

YADI BASARI GUNAWAN, SE, M.Si
 NIP.197511011995031002

Sasaran	Indikator	Target				Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan		Target								Penanggung Jawab	
		I	II	III	IV				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV			
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
Meningkatnya Mutu Pelayanan dalam bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat	Prosentase Tindak lanjut/ penindakan pelanggaran ketertiban umum dan ketentraman masyarakat	20%	45%	70%	92%	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran												
						Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Presentase Penegakkan Perda	Persen	20	114.943.100	45	236.668.800	70	256.194.700	92	277.769.700	Bidang Tibum dan PPUD	
						Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Penanganan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban umum	Persen	25	96.768.000	50	162.750.800	75	166.200.800	100	166.200.800	Kabid. Tibum	
						Sub Keg. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	-	4.168.000	-	9.750.800	-	13.200.800	1	13.200.800		
						Sub Keg. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Laporan	3	13.800.000	6	25.050.000	9	25.050.000	12	25.050.000		
						Sub Keg. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Laporan	3	73.800.000	6	122.950.000	9	122.950.000	12	122.950.000		
						Sub Keg. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Unit	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000	1	5.000.000		Kabid. PPUD
						Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota yang ditegakan	Persen	25	18.175.100	50	73.918.000	75	89.993.900	100	111.568.900		
						Sub Keg. Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Dokumen	1	5.000.100	1	5.000.100	1	5.000.100	1	5.000.100		
						Sub Keg. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	Unit	-	0	4	32.567.900	4	32.567.900	4	32.567.900		
Sub Keg. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Laporan	-	0	-	7.500.000	-	7.500.000	1	15.900.000								
						Sub Keg. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	-	13.175.000	-	28.850.000	-	44.925.900	1	58.100.900		
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana kebakaran	Presentase Tingkat Waktu Tanggap (Response Time Rate) (Wilayah Management Kebakaran) Tepat Waktu	-	-	-	100%	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	3.037.350.000	100	3.355.705.000	100	3.391.155.000	100	3.391.155.000	Bidang Damkar	
						Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pencegahan, Penanggulangan Dan Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persen	100	3.037.350.000	100	3.355.705.000	100	3.391.155.000	100	3.391.155.000	Kabid. Damkar	
						Sub Keg. Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen	-	1.950.000	-	3.750.000	-	5.600.000	1	5.600.000		

Sasaran	Indikator	Target				Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan		Target								Penanggung Jawab
		I	II	III	IV				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
						Sub Keg. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	3	35.400.000	6	67.200.000	9	100.800.000	12	100.800.000	Kabid. Damkar
						Sub Keg. Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Dokumen	-	3.000.000.000	-	3.284.755.000	-	3.284.755.000	1	3.284.755.000	
Meningkatnya kinerja penyelenggaraan pemerintahan daerah dan Pelayanan Publik	Nilai Hasil Evaluasi AKIP pada Satpol PP	-	80	-	-	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	-	2.190.782.925	80	4.924.387.677	-	7.145.244.402	-	9.639.143.136	Sekretariat
	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	-	80	Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Persen	25	38.224.441	50	92.709.441	75	151.299.941	100	214.663.881	Sekretaris
						Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	-	1.915.500	1	3.010.500	2	4.926.000	3	4.926.000	Ka Sub Bag. Program
						Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	-	0	-	0	-	1.095.000	1	3.000.000	
						Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	-	-	-	0	-	1.095.000	1	3.000.000	
						Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	-	-	-	0	-	0	1	3.000.000	
						Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	-	-	-	0	-	1.095.000	1	3.000.000	
						Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	36.308.941	3	89.698.941	3	143.088.941	3	197.737.881	
						Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	25	1.400.020.313	50	2.934.590.596	75	4.097.664.052	100	5.388.097.605	Sekretaris
						Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org./Bln.	44	1.400.020.313	44	2.934.590.596	44	4.097.664.052	44	5.388.097.605	Ka Sub Bag. Keuangan
						Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	25	42.486.200	50	56.472.500	75	68.458.800	100	80.476.100	Sekretaris
						Sub Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	1	1.000.000	1	1.000.000	1	1.000.000	Ka Sub Bag. Umpeg
						Sub Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	3.034.250	3	6.068.500	3	9.102.750	3	12.138.000	
						Sub Keg. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.087.500	2	2.175.000	2	3.262.500	2	4.350.000	
						Sub Keg. Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	4	6.299.550	4	10.789.100	4	15.278.650	4	19.768.200	
						Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	umlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	28.440.000	2	29.440.000	2	29.440.000	2	29.470.000	
						Sub Keg. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	-	3.624.900	-	6.999.900	-	10.374.900	1	13.749.900	
						Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	25	573.531.471	50	1.410.404.640	75	2.256.239.059	100	3.359.573.000	Sekretaris
						Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	15.764.325	6	31.528.650	9	47.292.975	12	63.057.300	Ka Sub Bag. Program
						Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	3	557.767.146	6	1.378.875.990	9	2.208.946.084	12	3.296.515.700	
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	-	136.520.500	-	430.210.500	-	571.582.550	100	596.332.550	Sekretaris					

Sasaran	Indikator	Target				Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan		Target								Penanggung Jawab
		I	II	III	IV				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
						Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	36.820.500	4	124.980.500	6	149.730.500	8	174.480.500	Ka Sub Bag. Umpeg
						Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	3	99.700.000	6	275.600.000	9	390.910.050	11	390.910.050	
						Sub Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	-	0	15	9.630.000	15	9.630.000	15	9.630.000	
						Sub Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirhabilitasi	Unit	-	0	1	20.000.000	1	21.312.000	1	21.312.000	

Rangkasbitung, Januari 2025
Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Dan
Pemadam Kebakaran Kabupaten Lebak



DARTIM, S.Sos., M.Si.
NIP. 19690525 199009 1 002

Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Lebak

Sasaran	Indikator	Target				Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan		Target								Penanggung Jawab
		I	II	III	IV				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
Meningkatnya Penyelenggaraan Penegakan Perda dan Ketertiban Umum	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) (Poin)	-	-	-	74,00	Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran				5.308.063.584		8.428.806.299		10.816.792.768		13.332.225.606	
						Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Presentase Penegakkan Perda	Persen	20	102.955.000	45	195.597.900	70	287.852.700	92	582.589.700	Bidang Tibum dan PPUD
						Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Penanganan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban umum	Persen	25	87.600.000	50	149.500.000	75	199.050.000	100	462.682.000	Kabid. Tibum
						Sub Keg. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	-	0	-	3.000.000	-	4.000.000	1	7.700.000	
						Sub Keg. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Laporan	3	13.800.000	6	23.550.000	9	37.050.000	12	105.900.000	
						Sub Keg. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Laporan	3	73.800.000	6	122.950.000	9	152.950.000	12	344.032.000	
						Sub Keg. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Unit	-	0	-	0	1	5.050.000	1	5.050.000	
						Kegiatan Pegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota yang ditegakan	Persen	25	15.355.000	50	46.097.900	75	88.802.700	100	119.907.700	Kabid. PPUD
						Sub Keg. Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Dokumen	1	2.180.000	1	2.180.000	1	2.180.000	1	2.180.000	
						Sub Keg. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	Unit	-	0	1	8.567.900	4	22.567.900	4	22.567.900	
						Sub Keg. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Laporan	-	0	-	7.500.000	-	20.480.000	1	30.610.000	
						Sub Keg. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	-	13.175.000	-	27.850.000	-	43.574.800	1	64.549.800	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana kebakaran	Persentase Layanan Respon Cepat (Response Time) Penanggulangan Kejadian Kebakaran (%)	-	-	-	60,00	Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persen	100	3.037.200.000	100	3.380.605.000	100	3.542.105.000	100	3.594.564.800	Bidang Damkar
						Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, dan Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pencegahan, Penanggulangan Dan Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persen	100	3.037.200.000	100	3.380.605.000	100	3.542.105.000	100	3.594.564.800	Kabid. Damkar
						Sub Keg. Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/ Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen	-	1.800.000	-	5.450.000	-	5.450.000	1	6.309.800	

Sasaran	Indikator	Target				Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan		Target								Penanggung Jawab
		I	II	III	IV				Triwulan I		Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV		
									K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	
						Sub Keg. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	3	35.400.000	6	90.400.000	9	123.900.000	12	175.500.000	Kabid. Damkar
						Sub Keg. Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Dokumen	-	3.000.000.000	-	3.284.755.000	-	3.412.755.000	1	3.412.755.000	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan tingkat kepuasan masyarakat atas layanan publik dalam urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penanggulangan kebakaran	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) (Poin)	-	78,50	-	-	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	-	2.167.908.584	80	4.852.603.399	-	6.986.835.068	-	9.155.071.106	Sekretariat
						Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Persen	25	35.760.000	50	90.610.000	75	154.090.000	100	222.190.000	Sekretaris
						Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	-	0	-	0	1	1.460.000	3	1.460.000	Ka Sub Bag. Program
	Indeks Pelayanan / Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM)	-	-	-	83,30	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	-	0	1	730.000	1	730.000	1	730.000	
						Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	-	0	1	730.000	1	730.000	1	730.000	
						Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	-	0	-	0	1	730.000	1	730.000	
						Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	-	0	-	0	-	0	1	730.000	
	Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	35.760.000	3	89.150.000	3	150.440.000	3	217.810.000	Ka Sub Bag. Keuangan					
	Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	25	1.392.520.313	50	2.927.887.164	75	3.926.917.476	100	4.817.952.326		Sekretaris				
	Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org./Bln.	44	1.392.520.313	44	2.927.887.164	44	3.926.917.476	44	4.817.952.326						
	Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	25	29.576.300	50	40.336.600	75	88.314.150	100	116.105.000	Sekretaris					
	Sub Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	1	14.500.000	1	14.500.000	Ka Sub Bag. Umpeg					
	Sub Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	6.034.250	3	7.542.500	3	15.607.750	3	22.354.000						
	Sub Keg. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.087.500	2	2.475.000	2	4.713.000	2	5.925.000						
	Sub Keg. Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	4	4.969.550	4	9.459.100	4	17.958.400	4	24.826.000						
	Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	umlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	14.110.000	2	14.110.000	2	24.610.000	2	33.000.000						
	Sub Keg. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	-	3.375.000	-	6.750.000	-	10.925.000	1	15.500.000						
	Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	25	573.531.471	50	1.416.089.135	75	2.215.126.942	100	3.247.186.280	Sekretaris					
	Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	15.764.325	6	30.713.145	9	42.298.940	12	53.957.300	Ka Sub Bag. Program					
	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	3	557.767.146	6	1.385.375.990	9	2.172.828.002	12	3.193.228.980						
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	-	136.520.500	-	377.680.500	-	602.386.500	100	751.637.500	Sekretaris					

Sasaran	Indikator	Target					Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan		Target								Penanggung Jawab
		I	II	III	IV	Triwulan I				Triwulan II		Triwulan III		Triwulan IV				
						K				Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.		
						Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	36.820.500	4	124.980.500	6	144.480.500	8	162.480.500	Ka Sub Bag. Umpeg	
						Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	3	99.700.000	6	230.600.000	9	396.400.000	11	525.421.000		
						Sub Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	-	0	5	7.400.000	10	17.730.000	15	19.960.000		
						Sub Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	-	0	1	14.700.000	1	43.776.000	1	43.776.000		

Rangkasbitung, Desember 2025



YADI BASARI GUNAWAN, SE., M.Si.
NIP. 19751101 199503 1 002

Laporan Monitoring Dan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Lebak

Sasaran	Indikator	Target	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target						Realisasi										Catatan	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab		
						I		II		III		IV		I		II		III		IV					Capaian	
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.
Meningkatnya Penyelenggaraan Penegakan Perda dan Ketertiban Umum	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) (Poin)	74,00	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Presentase Penegakkan Perda	Persen	25	102.955.000	50	195.597.900	75	287.852.700	100	582.589.700	25	35.890.000							100%	35%			Bidang Tibum dan PPUD
			Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Penanganan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban umum	Persen	25	87.600.000	50	149.500.000	75	199.050.000	100	462.682.000	25	23.400.000							100%	27%			Kabid. Tibum
			Sub Keg. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	0	0	-	3.000.000	-	4.000.000	1	7.700.000	0	0							0%	0%			Kasi Linmas
			Sub Keg. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Laporan	3	13.800.000	6	23.550.000	9	37.050.000	12	105.900.000	3	0							100%	0%	Pelaksanaan Anggaran masih pada tahap kerja sama/kontrak dengan pihak ketiga, selain itu beberapa rekening belanja mengalami penangguhan	Penyerapan Anggaran dilaksanakan pada Triwulan berikutnya	Kasi Pamwal & Dalmas
			Sub Keg. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Laporan	3	73.800.000	6	122.950.000	9	152.950.000	12	344.032.000	3	23.400.000							100%	32%	Pelaksanaan Anggaran masih pada tahap kerja sama/kontrak dengan pihak ketiga, selain itu beberapa rekening belanja mengalami penangguhan	Penyerapan Anggaran dilaksanakan pada Triwulan berikutnya	Kasi Pamwal & Dalmas
			Sub Keg. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Unit	-	0	-	0	1	5.050.000	1	5.050.000	0	0							0%	0%			Kabid. Tibum
			Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota yang ditegakan	Persen	25	15.355.000	50	46.097.900	75	88.802.700	100	119.907.700	25	12.490.000							100%	81%			Kabid. PPUD
			Sub Keg. Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Dokumen	1	2.180.000	1	2.180.000	1	2.180.000	1	2.180.000	-	0							-	-	Pelaksanaan Anggaran masih pada tahap kerja sama/kontrak dengan pihak ketiga, selain itu kekurangan personil mengakibatkan kegiatan ditunda	Penyerapan Anggaran dilaksanakan pada Triwulan berikutnya	Kasi Lidik
			Sub Keg. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksanaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	Unit	-	0	1	8.567.900	4	22.567.900	4	22.567.900	-	12.490.000							-	-			Kasi Binwaslul
			Sub Keg. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Laporan	-	0	1	7.500.000	1	20.480.000	1	30.610.000	-	12.540.000							-	-	Kegiatan belum bisa dilaksanakan menyesuaikan dengan jadwal Keajksaan Negeri Lebak	Mengatur ulang jadwal pelaksanaan kegiatan dengan pihak terkait	Kasi Binwaslul
			Sub Keg. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	1	13.175.000	1	27.850.000	1	43.574.800	1	64.549.800	1	12.540.000							100%	95%			Kasi Lidik
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, & Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persen	25	3.037.200.000	50	3.380.605.000	75	3.542.105.000	100	3.594.564.800	25,00	912.906.000							100%	30%			Bidang Damkar

Sasaran	Indikator	Target	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target								Realisasi										Catatan	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab			
						I		II		III		IV		I		II	III	IV	Capaian										
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.								
			Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, & Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pencegahan, Pengendalian, Dan Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persen	25	3.037.200.000	50	3.380.605.000	75	3.542.105.000	100	3.594.564.800	25,00	912.906.000									100%	30%			Kabid. Damkar	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana kebakaran	Persentase Layanan Respon Cepat (Response Time) Penanggulangan Kejadian Kebakaran (%)	60,00	Sub Keg. Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen	-	1.800.000	-	5.450.000	-	5.450.000	1	6.309.800	-	-									-	-	Kegiatan belum dilaksanakan dikarenakan kekurangan personil	Mengatur ulang jadwal pelaksanaan kegiatan	Kasi Pencegahan	
			Sub Keg. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	3	35.400.000	6	90.400.000	9	123.900.000	12	175.500.000	3	19.800.000									100%	56%	Penyerapan anggaran pada beberapa rekening belanja mengalami penanguhan/penundaan	Penyerapan Anggaran dilaksanakan pada Triwulan berikutnya	Kasi Gulmat	
			Sub Keg. Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Dokumen	1	3.000.000.000	1	3.284.755.000	1	3.412.755.000	1	3.412.755.000	1	893.106.000									100%	30%	Penyerapan anggaran dilaksanakan berupa uang muka pembelian 2 Unit Mobil Damkar	Penyerapan Anggaran dilaksanakan pada Triwulan berikutnya	Kabid. Damkar	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan tingkat kepuasan masyarakat atas layanan publik dalam urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penanggulangan kebakaran	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) (Poin)	78,50	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	0	2.167.908.584	80	4.852.603.399	80	6.986.835.068	80	9.155.071.106	0	2.066.411.179									0%	95%			Sekretariat	
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Persen	25	35.760.000	50	90.610.000	75	154.090.000	100	222.190.000	0	31.700.000									0%	89%			Sekretaris	
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Poin)	83,30	Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	-	0	-	0	1	1.460.000	3	1.460.000	0	0									0%	0%			Ka Sub Bag. Program	
			Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	-	0	1	730.000	1	730.000	1	730.000	0	0									0%	0%				
			Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	-	0	1	730.000	1	730.000	1	730.000	0	0									0%	0%				
			Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	-	0	-	0	1	730.000	1	730.000	0	0									0%	0%				
			Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	-	0	-	0	-	0	1	730.000	0	0									0%	0%				
			Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	35.760.000	3	89.150.000	3	150.440.000	3	217.810.000	3	31.700.000									100%	89%	Honorarium Pengurus Barang Pengguna dan sangga Data belum bisa diserap dikarenakan belum keluarnya SK Bupati yang mengaturnya	Penyerapan Anggaran dilaksanakan apabila SK sudah terbit		
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	25	1.392.520.313	50	2.927.887.164	75	3.926.917.476	100	4.817.952.326	25	1.109.448.055									100%	80%				Sekretaris
			Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org./Bln.	44	1.392.520.313	44	2.927.887.164	44	3.926.917.476	44	4.817.952.326	44	1.109.448.055									100%	80%				Ka Sub Bag. Keuangan
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	25	29.576.300	50	40.336.600	75	88.314.150	100	116.105.000	16,67	8.820.000									66,67%	30%				Sekretaris
			Sub Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	1	14.500.000	1	14.500.000	0	0									0%	0%				Ka Sub Bag. Umpeg

Sasaran	Indikator	Target	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target						Realisasi										Catatan	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab		
						I		II		III		IV		I		II		III		IV					Capaian	
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.
			Sub Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	6.034.250	3	7.542.500	3	15.607.750	3	22.354.000									0%	0%	Pelaksanaan Anggaran masih pada tahap kerjasama/kontrak dengan pihak ketiga, selain itu beberapa rekening belanja mengalami penangguhan/penundaan	Penyerapan Anggaran dilaksanakan pada Triwulan berikutnya	Ka Sub Bag. Umpeg
			Sub Keg. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.087.500	2	2.475.000	2	4.713.000	2	5.925.000	0	0							0%	0%			
			Sub Keg. Penyediaan Bahan/Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	4	4.969.550	4	9.459.100	4	17.958.400	4	24.826.000	0	0							0%	0%			
			Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	umlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	14.110.000	2	14.110.000	2	24.610.000	2	33.000.000	1	8.820.000							50%	63%			
			Sub Keg. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	-	3.375.000	-	6.750.000	-	10.925.000	1	15.500.000	0	0							0%	0%			
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	25	573.531.471	50	1.416.089.135	75	2.215.126.942	100	3.247.186.280	25	814.443.124							100%	142%			Sekretaris
			Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	15.764.325	6	30.713.145	9	42.298.940	12	53.957.300	3	9.703.107							100%	62%			Ka Sub Bag. Umpeg
			Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	3	557.767.146	6	1.385.375.990	9	2.172.828.002	12	3.193.228.980	3	804.740.017							100%	144%	Penerapan skema penggajian baru bagi Non ASN menjadi PPPK PW		
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	25	136.520.500	50	377.680.500	75	602.386.500	100	751.637.500	100,00	102.000.000							100,00%	5,46%			Sekretaris
			Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	36.820.500	4	124.980.500	6	144.480.500	8	162.480.500	2	23.000.000							100,00%	62%	Pelaksanaan Anggaran masih pada tahap kerjasama/kontrak dengan pihak ketiga, selain itu beberapa rekening belanja	Penyerapan Anggaran dilaksanakan pada Triwulan berikutnya	Ka Sub Bag. Umpeg
			Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	3	99.700.000	6	230.600.000	9	396.400.000	11	525.421.000	2	79.000.000							66,67%	79%			
			Sub Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	0	5	7.400.000	10	17.730.000	15	19.960.000	0	0							0,00%	0,00%			
			Sub Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	1	14.700.000	1	43.776.000	1	43.776.000	0	0							0,00%	0,00%			

Rangkasbitung, April 2025
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN LEBAK



DARTIM, S.Sos., M.Si.
NIP. 19690525 199009 1 002

Laporan Monitoring Dan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Lebak

Sasaran	Indikator	Target	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target								Realisasi										Catatan	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	
						I		II		III		IV		I		II		III		IV		Capaian					
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
Meningkatnya Penyelenggaraan Penegakan Perda dan Ketertiban Umum	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) (Poin) Umum	74,00	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Presentase Penegakkan Perda	Persen	25	102.955.000	50	195.597.900	75	287.852.700	100	582.589.700	25	35.890.000	50	105.834.000					100%	54%			Bidang Tibum dan PPUD	
			Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/ Kota	Cakupan Penanganan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban umum	Persen	25	87.600.000	50	149.500.000	75	199.050.000	100	462.682.000	25	23.400.000	50	79.584.000					100%	53%			Kabid. Tibum	
			Sub Keg. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketenteraman dan Ketertiban Umum	Dokumen	0		0	1	3.000.000	1	4.000.000	1	7.700.000	0	0	0	0					0%	0%			Kasi Linmas
			Sub Keg. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Laporan	3	13.800.000	6	23.550.000	9	37.050.000	12	105.900.000	3	0	6	8.400.000					100%	36%	Pelaksanaan Anggaran masih pada tahap kerja sama/kontrak dengan pihak ketiga, selain itu beberapa rekening belanja mengalami penangguhan	Penyerapan Anggaran dilaksanakan pada Triwulan berikutnya	Kasi Pamwal & Dalmas	
			Sub Keg. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penerbitan dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Laporan	3	73.800.000	6	122.950.000	9	152.950.000	12	344.032.000	3	23.400.000	6	71.184.000				100%	58%	Kasi Pamwal & Dalmas				
			Sub Keg. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Unit	0		0	0	0	1	5.050.000	1	5.050.000	0	0	0	0				0%	0%			Kabid. Tibum	
			Kegiatan Penegakan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota yang ditegakan	Persen	25	15.355.000	50	46.097.900	75	88.802.700	100	119.907.700	25	12.490.000	50	26.250.000				100%	57%					Kabid. PPUD
			Sub Keg. Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Dokumen	1	2.180.000	1	2.180.000	1	2.180.000	1	2.180.000	-	0	-	0				0%	0%	Pelaksanaan Anggaran masih pada tahap kerja sama/kontrak dengan pihak ketiga, selain itu kekurangan personil mengakibatkan kegiatan ditunda	Penyerapan Anggaran dilaksanakan pada Triwulan berikutnya	Kasi Lidik		
			Sub Keg. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	Unit	-		0	1	8.567.900	4	22.567.900	4	22.567.900	-	12.490.000	-	0	0			0%	0%			Kasi Binwasluh	
			Sub Keg. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Laporan	-	0	1	7.500.000	1	20.480.000	1	30.610.000	-	12.540.000	-	0	0			0%	0%	Kegiatan belum bisa dilaksanakan menyesuaikan dengan jadwal Keajaasaan Negeri Lebak	Mengatur ulang jadwal pelaksanaan kegiatan dengan pihak terkait	Kasi Binwasluh		
			Sub Keg. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	1	13.175.000	1	27.850.000	1	43.574.800	1	64.549.800	1	12.540.000	1	26.250.000				100%	94%			Kasi Lidik		
			Program Pencegahan, Pengendalian, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Terlaksananya Pencegahan, Pemadaman, Penyelamatan, & Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persen	25	3.037.200.000	50	3.380.605.000	75	3.542.105.000	100	3.594.564.800	25,00	912.906.000	25,00	3.061.955.910					50%	91%			Bidang Damkar	

Sasaran	Indikator	Target	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target								Realisasi										Catatan	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab	
						I		II		III		IV		I		II		III		IV		Capaian					
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				
			Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, & Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pencegahan, Penanggulangan Dan Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persen	25	3.037.200.000	50	3.380.605.000	75	3.542.105.000	100	3.594.564.800	25,00	912.906.000	25,00	3.061.955.910					50%	91%			Kabid. Damkar	
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana kebakaran	Persentase Layanan Respon Cepat (Response Time) Penanggulangan Kejadian Kebakaran (%)	60,00	Sub Keg. Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen	1	1.800.000	1	5.450.000	1	5.450.000	1	6.309.800	-	-	1	5.250.000					100%	96%			Kasi Pencegahan	
			Sub Keg. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiapsiagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	3	35.400.000	6	90.400.000	9	123.900.000	12	175.500.000	3	19.800.000	6	53.400.000					100%	59%	Penyerapan anggaran pada beberapa rekening belanja mengalami penangguhan/penundaan	Penyerapan Anggaran dilaksanakan pada Triwulan berikutnya	Kasi Gulmat	
			Sub Keg. Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Dokumen	1	3.000.000.000	1	3.284.755.000	1	3.412.755.000	1	3.412.755.000	1	893.106.000	1	3.003.305.910					100%	91%			Kabid. Damkar	
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan tingkat kepuasan masyarakat atas layanan publik dalam urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penanggulangan kebakaran	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) (Poin)	78,50	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	0	2.167.908.584	78,50	4.852.603.399	78,50	6.986.835.068	78,50	9.155.071.106	0	2.066.411.179	78,95	4.090.930.599					101%	84%			Sekretariat	
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Persen	25	35.760.000	50	90.610.000	75	154.090.000	100	222.190.000	0	31.700.000	50	82.130.000					100%	91%			Sekretaris	
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Poin)	83,30	Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	-	0	-	0	1	1.460.000	3	1.460.000	0	0	0	0					0%	0%		Beberapa rekening belanja mengalami penangguhan/ penundaan	Penyerapan Anggaran dilaksanakan pada Triwulan berikutnya	Ka Sub Bag. Program
			Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	-	0	1	730.000	1	730.000	1	730.000	0	0	0	0					0%	0%				
			Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	-	0	1	730.000	1	730.000	1	730.000	0	0	0	0					0%	0%				
			Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	-	0	-	0	1	730.000	1	730.000	0	0	0	0					0%	0%				
			Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	-	0	-	0	-	0	1	730.000	0	0	0	0					0%	0%				
			Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	35.760.000	3	89.150.000	3	150.440.000	3	217.810.000	3	31.700.000	3	82.130.000					100%	92%				
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	25	1.392.520.313	50	2.927.887.164	75	3.926.917.476	100	4.817.952.326	25	1.109.448.055	50	2.338.485.977					100%	80%			Sekretaris	
			Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org./Bln.	44	1.392.520.313	44	2.927.887.164	44	3.926.917.476	44	4.817.952.326	44	1.109.448.055	44	2.338.485.977					100%	80%			Ka Sub Bag. Keuangan	
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	25	29.576.300	50	40.336.600	75	88.314.150	100	116.105.000	16,67	8.820.000	50,00	26.083.000					100%	65%			Sekretaris	
			Sub Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	1	14.500.000	1	14.500.000	0	0	0	0					0%	0%		Ka Sub Bag. Umpeg		
			Sub Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	6.034.250	3	7.542.500	3	15.607.750	3	22.354.000	0	0	2	7.524.000					67%	100%				
			Sub Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.087.500	2	2.475.000	2	4.713.000	2	5.925.000	0	0	0	0					0%	0%				
			Sub Keg. Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	4	4.969.550	4	9.459.100	4	17.958.400	4	24.826.000	0	0	2	8.399.000					50%	89%				
			Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	umlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	14.110.000	2	14.110.000	2	24.610.000	2	33.000.000	1	8.820.000	2	10.160.000					100%	72%				

Sasaran	Indikator	Target	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target								Realisasi								Catatan	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab		
						I		II		III		IV		I		II		III		IV					Capaian	
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.
			Sub Keg. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	-	3.375.000	-	6.750.000	-	10.925.000	1	15.500.000	0	0	0	0					0%	0%			Ka Sub Bag. Umpeg
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	25	573.531.471	50	1.416.089.135	75	2.215.126.942	100	3.247.186.280	25	814.443.124	50	1.382.076.803					100%	98%			Sekretaris
			Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	15.764.325	6	30.713.145	9	42.298.940	12	53.957.300	3	9.703.107	6	24.854.623					100%	81%			Ka Sub Bag. Umpeg
			Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	3	557.767.146	6	1.385.375.990	9	2.172.828.002	12	3.193.228.980	3	804.740.017	6	1.357.222.180					100%	98%			
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	25	136.520.500	50	377.680.500	75	602.386.500	100	751.637.500	25,00	102.000.000	50,00	262.154.819					100%	69%			Sekretaris
			Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	36.820.500	4	124.980.500	6	144.480.500	8	162.480.500	2	23.000.000	4	49.862.800					100%	40%	Pelaksanaan Anggaran masih pada tahap kerjasama/kontrak dengan pihak ketiga, selain itu beberapa rekening belanja mengalami penangguhan/ penundaan	Penyerapan Anggaran dilaksanakan pada Triwulan berikutnya	Ka Sub Bag. Umpeg
			Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	3	99.700.000	6	230.600.000	9	396.400.000	11	525.421.000	2	79.000.000	4	210.770.875					67%	91%			
			Sub Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	0	5	7.400.000	10	17.730.000	15	19.960.000	0	0	5	1.521.144					100%	21%			
			Sub Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Dirchabilitasi	Unit	0	0	1	14.700.000	1	43.776.000	1	43.776.000	0	0	0	0					0%	0%			

Rangkasbitung, Juli 2025
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN LEBAK



DARTIM, S.Sos., M.Si.
NIP. 19690525 199009 1 002

Laporan Monitoring Dan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Lebak

Sasaran	Indikator	Target	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target								Realisasi										Catatan	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab
						I		II		III		IV		I		II		III		IV		Capaian				
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.			
Meningkatnya Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) (Poin) dan Ketertiban Umum	Indeks Penyelenggaraan Ketenteraman dan Ketertiban Umum (IPKKU) (Poin)	74,00	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Presentase Penegakkan Perda	Persen	25	102.955.000	50	195.597.900	75	287.852.700	100	582.589.700	25	35.890.000	50	105.834.000	75	194.629.320		100%	68%				Bidang Tibum dan PPUD
			Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Cakupan Penanganan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban umum	Persen	25	87.600.000	50	149.500.000	75	199.050.000	100	462.682.000	25	23.400.000	50	79.584.000	75	137.250.000		100%	69%				Kabid. Tibum
			Sub Keg. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Tranitibum	Dokumen	0	0	1	3.000.000	1	4.000.000	1	7.700.000	0	0	0	0	1	1.650.000		100%	41%	Kekurangan personil dan jadwal yang bersamaan dg kegiatan lain sehingga perlu penyesuaian	Penyerapan Anggaran dilaksanakan pada Triwulan berikutnya	Kasi Linmas	
			Sub Keg. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Jumlah Laporan Gangguan Tranitibum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Pelaksanaan Patroli, Pengamanan, dan Pengawasan	Laporan	3	13.800.000	6	23.550.000	9	37.050.000	12	105.900.000	3	0	6	8.400.000	9	24.600.000		100%	66%			Kasi Pamwal & Dalmas	
			Sub Keg. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum Berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penteriban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Laporan	3	73.800.000	6	122.950.000	9	152.950.000	12	344.032.000	3	23.400.000	6	71.184.000	9	111.000.000		100%	73%			Kasi Pamwal & Dalmas	
			Sub Keg. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Tranitibum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Unit	0	0	0	0	1	5.050.000	1	5.050.000	0	0	0	0	0	0		0%	0%			Kabid. Tibum	
			Kegiatan Penegakan Perda Kab/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase Perda Kab/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota yang ditegakan	Persen	25	15.355.000	50	46.097.900	75	88.802.700	100	119.907.700	25	12.490.000	50	26.250.000	75	57.379.320		100%	65%				Kabid. PPUD
			Sub Keg. Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Dokumen	1	2.180.000	1	2.180.000	1	2.180.000	1	2.180.000	-	0	-	0	1,00	1.917.000		100%	88%				Kasi Lidik
			Sub Keg. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	Unit	-	0	1	8.567.900	4	22.567.900	4	22.567.900	-	12.490.000	-	0	-	0		0%	0%				Kasi Binwaslulh
			Sub Keg. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Laporan	-	0	1	7.500.000	1	20.480.000	1	30.610.000	-	12.540.000	-	0	1,00	12.500.000		100%	61%				Kasi Binwaslulh
			Sub Keg. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	1	13.175.000	1	27.850.000	1	43.574.800	1	64.549.800	1	12.540.000	1	26.250.000	1	42.962.320		100%	99%				Kasi Lidik
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, & Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persen	25	3.037.200.000	50	3.380.605.000	75	3.542.105.000	100	3.594.564.800	25,00	912.906.000	25,00	3.061.955.910	75,00	3.354.352.410		100%	91%				Bidang Damkar
			Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, & Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pencegahan, Pengendalian, Dan Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persen	25	3.037.200.000	50	3.380.605.000	75	3.542.105.000	100	3.594.564.800	25,00	912.906.000	25,00	3.061.955.910	75,00	3.354.352.410		100%	95%				Kabid. Damkar
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana kebakaran	Persentase Layanan Respon Cepat (Response Time) Penanggulangan Kejadian Kebakaran (%)	60,00	Sub Keg. Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penangulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen	1	1.800.000	1	5.450.000	1	5.450.000	1	6.309.800	-	-	1	5.250.000	1	5.250.000		100%	96%				Kasi Pencegahan

Sasaran	Indikator	Target	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target						Realisasi								Catatan	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab				
						I		II		III		IV		I		II		III					IV		Capaian	
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.	K	Rp.
			Sub Keg. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiap siagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	3	35.400.000	6	90.400.000	9	123.900.000	12	175.500.000	3	19.800.000	6	53.400.000	9	92.550.000			100%	75%			Kasi Gulmat
			Sub Keg. Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Dokumen	1	3.000.000.000	1	3.284.755.000	1	3.412.755.000	1	3.412.755.000	1	893.106.000	1	3.003.305.910	1	3.256.552.410			100%	95%			Kabid. Damkar
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan tingkat kepuasan masyarakat atas layanan publik dalam urusan ketenteraman dan keterbitan umum serta penanggulangan kebakaran	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) (Poin)	78,50	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	0	2.167.908.584	78,50	4.852.603.399	78,50	6.986.835.068	78,50	9.155.071.106	0	2.066.411.179	78,95	4.090.930.599	78,95	6.086.016.052			101%	87%			Sekretariat
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Persen	25	35.760.000	50	90.610.000	75	154.090.000	100	222.190.000	0	31.700.000	50	82.130.000	50	128.830.000			67%	84%			Sekretaris
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Poin)	83,30	Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	-	0	-	0	1	1.460.000	3	1.460.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%	Beberapa rekening belanja mengalami penangguhan/ penundaan	Penyerapan Anggaran dilaksanakan pada Triwulan berikutnya	Ka Sub Bag. Program
			Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	-	0	1	730.000	1	730.000	1	730.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%				
			Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	-	0	1	730.000	1	730.000	1	730.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%				
			Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	-	0	-	0	1	730.000	1	730.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%				
			Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	-	0	-	0	-	0	1	730.000	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%				
			Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	35.760.000	3	89.150.000	3	150.440.000	3	217.810.000	3	31.700.000	3	82.130.000	3	128.830.000			100%	86%			
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	25	1.392.520.313	50	2.927.887.164	75	3.926.917.476	100	4.817.952.326	25	1.109.448.055	50	2.338.485.977	75	3.339.501.861			100%	85%			Sekretaris
			Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org./Bln.	44	1.392.520.313	44	2.927.887.164	44	3.926.917.476	44	4.817.952.326	44	1.109.448.055	44	2.338.485.977	44	3.339.501.861	100%	85%			Ka Sub Bag. Keuangan		
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	25	29.576.300	50	40.336.600	75	88.314.150	100	116.105.000	16,67	8.820.000	50	26.083.000	75	52.866.100			100%	60%			Sekretaris
			Sub Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	1	14.500.000	1	14.500.000	0	0	0	0	0	0	0	0	0%	0%			Ka Sub Bag. Umpeg
			Sub Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	6.034.250	3	7.542.500	3	15.607.750	3	22.354.000	0	0	2	7.524.000	2	10.653.600			67%	68%			
			Sub Keg. Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetakan dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.087.500	2	2.475.000	2	4.713.000	2	5.925.000	0	0	0	0	1	2.817.000			50%	60%			
			Sub Keg. Penyediaan Bahan/ Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	4	4.969.550	4	9.459.100	4	17.958.400	4	24.826.000	0	0	2	8.399.000	3	12.635.500			75%	70%			
			Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	umlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	14.110.000	2	14.110.000	2	24.610.000	2	33.000.000	1	8.820.000	2	10.160.000	2	24.460.000			100%	99%			
			Sub Keg. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	3.375.000	1	6.750.000	1	10.925.000	1	15.500.000	0	0	0	0	1	2.300.000			100%	21%			Ka Sub Bag. Umpeg
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	25	573.531.471	50	1.416.089.135	75	2.215.126.942	100	3.247.186.280	25	814.443.124	50	1.382.076.803	75	2.166.587.172			100%	98%			Sekretaris
			Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	15.764.325	6	30.713.145	9	42.298.940	12	53.957.300	3	9.703.107	6	24.854.623	9	36.532.140			100%	86%			Ka Sub Bag. Umpeg
			Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	3	557.767.146	6	1.385.375.990	9	2.172.828.002	12	3.193.228.980	3	804.740.017	6	1.357.222.180	9	2.130.055.032			100%	98%			
			Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	25	136.520.500	50	377.680.500	75	602.386.500	100	751.637.500	25,00	102.000.000	50	262.154.819	75	398.230.919			100%	66%			Sekretaris

Sasaran	Indikator	Target	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target								Realisasi								Catatan	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab		
						I		II		III		IV		I		II		III		IV					Capaian	
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.
			Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	36.820.500	4	124.980.500	6	144.480.500	8	162.480.500	2	23.000.000	4	49.862.800	6	95.717.800			100%	66%	Pelaksanaan Anggaran masih pada tahap kerjasama/kontrak dengan pihak ketiga, selain itu beberapa rekening belanja mengalami penangguhan/ penundaan	Penyerapan Anggaran dilaksanakan pada Triwulan berikutnya	Ka Sub Bag. Umpeg
			Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	3	99.700.000	6	230.600.000	9	396.400.000	11	525.421.000	2	79.000.000	4	210.770.875	6	297.782.875			67%	75%			
			Sub Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	0	5	7.400.000	10	17.730.000	15	19.960.000	0	0	5	1.521.144	10	2.731.244			100%	15%			
			Sub Keg. Pemeliharaan/ Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	1	14.700.000	1	43.776.000	1	43.776.000	0	0	0	0	1	1.999.000			100%	5%			

Rangkasbitung, Oktober 2025
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN LEBAK



D A R T I M. S.Sos., M.Si.
NIP. 19690525 199009 1 002

Laporan Monitoring Dan Evaluasi Rencana Aksi Kinerja Tahun 2025
Satuan Polisi Pamong Praja Dan Pemadam Kebakaran
Kabupaten Lebak

Sasaran	Indikator	Target	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target								Realisasi								Catatan	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab		
						I		II		III		IV		I		II		III		IV					Capaian	
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.
Meningkatnya Penyelenggaraan Penegakan Perda dan Ketertiban Umum	Indeks Penyelenggaraan Ketertiban Umum (IPKKU) (Poin) Umum	74,00	Program Peningkatan Ketenteraman Dan Ketertiban Umum	Presentase Penegakkan Perda	Persen	25	102.955.000	50	195.597.900	75	287.852.700	100	582.589.700	25	35.890.000	50	105.834.000	75	194.629.320	100	568.854.580	100%	98%			Bidang Tibum dan PPUD
		Kegiatan Penanganan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum dalam 1 (satu) Daerah Kab/Kota	Cakupan Penanganan terhadap gangguan keamanan dan ketertiban umum	Persen	25	87.600.000	50	149.500.000	75	199.050.000	100	462.682.000	25	23.400.000	50	79.584.000	75	137.250.000	100	450.852.450	100%	97%			Kabid. Tibum	
		Sub Keg. Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Ketentraman dan Ketertiban Umum	Jumlah Dokumen yang Memuat Hasil Pemberdayaan Perlindungan Masyarakat dalam rangka Tranitibum	Dokumen	0	0	1	3.000.000	1	4.000.000	1	7.700.000	0	0	0	0	1	1.650.000	1	7.700.000	100%	100%			Kasi Linmas	
		Sub Keg. Pencegahan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Jumlah Laporan Gangguan Tranitibum yang Dicegah Melalui Deteksi Dini dan Cegah Dini, Pembinaan dan Penyuluhan, Patroli, Pengamanan, dan Pengawalan	Laporan	3	13.800.000	6	23.550.000	9	37.050.000	12	105.900.000	3	0	6	8.400.000	9	24.600.000	12	103.000.000	100%	97%			Kasi Pamwal & Dalmas	
		Sub Keg. Penindakan atas Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa	Jumlah Laporan Gangguan Ketenteraman dan Ketertiban Umum berdasarkan Perda dan Perkada Melalui Penertiban dan Penanganan Unjuk Rasa dan Kerusuhan Massa yang Dilakukan Penindakan	Laporan	3	73.800.000	6	122.950.000	9	152.950.000	12	344.032.000	3	23.400.000	6	71.184.000	9	111.000.000	12	335.274.000	100%	97%			Kasi Pamwal & Dalmas	
		Sub Keg. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Tranitibum	Jumlah Sarana dan Prasarana Ketenteraman dan Ketertiban Umum yang Tersedia	Unit	0	0	0	0	1	5.050.000	1	5.050.000	0	0	0	0	0	0	1	4.878.450	100%	97%			Kabid. Tibum	
		Kegiatan Penegakan Perda Kab/Kota dan Peraturan Bupati/Walikota	Persentase Perda Kab/Kota dan Peraturan Bupati/Wali Kota yang ditegakan	Persen	25	15.355.000	50	46.097.900	75	88.802.700	100	119.907.700	25	12.490.000	50	26.250.000	75	57.379.320	75	118.002.130	75%	98%			Kabid. PPUD	
		Sub Keg. Penyusunan SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Jumlah Dokumen SOP Penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Dokumen	1	2.180.000	1	2.180.000	1	2.180.000	1	2.180.000	-	0	-	0	1,00	1.917.000	1	1.917.000	100%	88%			Kasi Lidik	
		Sub Keg. Pengadaan dan Pemeliharaan Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah (Ruang Pemeriksaan, Gelar Perkara, dan Ruang Penyimpanan Barang Bukti)	Jumlah Sarana dan Prasarana Penegakan Peraturan Daerah	Unit	-	0	1	8.567.900	4	22.567.900	4	22.567.900	-	12.490.000	-	0	-	0	4	21.482.810	100%	95%			Kasi Binwasluh	
		Sub Keg. Penanganan atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/Wali Kota	Jumlah Laporan Pelaksanaan Penanganan Atas Pelanggaran Peraturan Daerah dan Peraturan kepala daerah Sesuai SOP	Laporan	-	0	1	7.500.000	1	20.480.000	1	30.610.000	-	12.540.000	-	0	1,00	12.500.000	1	30.510.000	100%	100%			Kasi Binwasluh	
		Sub Keg. Pengawasan atas Kepatuhan terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati/ Wali Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Pengawasan yang Dilakukan Terhadap Kepatuhan Terhadap Pelaksanaan Peraturan Daerah dan Peraturan Kepala Daerah	Laporan	1	13.175.000	1	27.850.000	1	43.574.800	1	64.549.800	1	12.540.000	1	26.250.000	1	42.962.320	1	64.092.320	100%	99%			Kasi Lidik	
			Program Pencegahan, Penanggulangan, Pengendalian, Pemadaman, Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Terlaksananya Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Penyelamatan, & Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Persen	25	3.037.200.000	50	3.380.605.000	75	3.542.105.000	100	3.594.564.800	25	912.906.000	25	3.061.955.910	75	3.354.352.410	100	3.562.254.150	100%	99%			Bidang Damkar
			Kegiatan Pencegahan, Pengendalian, Pemadaman, Dan Penyelamatan, & Penanganan Bahan Berbahaya dan Beracun Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Cakupan Pencegahan, Penanggulangan Dan Penyelamatan Kebakaran Dan Penyelamatan Non Kebakaran	Persen	25	3.037.200.000	50	3.380.605.000	75	3.542.105.000	100	3.594.564.800	25	912.906.000	25	3.061.955.910	75	3.354.352.410	100	3.562.254.150	100%	99%			Kabid. Damkar
Meningkatnya kualitas penyelenggaraan penanggulangan bencana kebakaran	Persentase Layanan Respon Cepat (Response Time) Penanggulangan Kejadian Kebakaran (%)	60,00	Sub Keg. Pencegahan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Dokumen NSPM Pencegahan/Penanggulangan Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota Setiap Tahunnya	Dokumen	1	1.800.000	1	5.450.000	1	5.450.000	1	6.309.800	-	-	1	5.250.000	1	5.250.000	1	6.023.820	100%	95%			Kasi Pencegahan
		Sub Keg. Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Jumlah Laporan Hasil Pelaksanaan Kegiatan Kesiap siagaan Petugas Piket dan Pemadaman Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota	Laporan	3	35.400.000	6	90.400.000	9	123.900.000	12	175.500.000	3	19.800.000	6	53.400.000	9	92.550.000	12	175.500.000	100%	100%			Kasi Gulmat	

Sasaran	Indikator	Target	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target								Realisasi								Catatan	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab		
						I		II		III		IV		I		II		III		IV					Capaian	
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.
			Sub Keg. Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri	Jumlah Dokumen Hasil Pelaksanaan Kegiatan Standarisasi Sarana dan Prasarana Pencegahan, Penanggulangan Kebakaran dan Alat Pelindung Diri Secara Berkala (Setiap Tahun), Sah, dan Legal	Dokumen	1	3.000.000.000	1	3.284.755.000	1	3.412.755.000	1	3.412.755.000	1	893.106.000	1	3.003.305.910	1	3.256.552.410	1	3.380.730.330	100%	99%			Kabid. Damkar
Meningkatnya tata kelola pemerintahan yang akuntabel dan tingkat kepuasan masyarakat atas layanan publik dalam urusan ketenteraman dan ketertiban umum serta penanggulangan kebakaran	Nilai Sistem Akuntabilitas Kinerja Pemerintah (SAKIP) (Poin)	78,50	Program Penunjang Urusan Pemerintahan Kabupaten/Kota	Nilai SAKIP Perangkat Daerah	Poin	0	2.167.908.584	78,50	4.852.603.399	78,50	6.986.835.068	78,50	9.155.071.106	0	2.066.411.179	78,95	4.090.930.599	78,95	6.086.016.052	78,95	8.687.125.637	101%	94,89%			Sekretariat
			Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah	Persentase Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah yang tersusun	Persen	25	35.760.000	50	90.610.000	75	154.090.000	100	222.190.000	0	31.700.000	50	82.130.000	75	128.830.000	100	209.672.000	100%	94,37%			Sekretaris
	Nilai Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) (Poin)	83,30	Sub Keg. Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	-	0	-	0	1	1.460.000	3	1.460.000	0	0	0	0	0	0	3	1.380.000	100%	95%			Ka Sub Bag. Program
			Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	-	0	1	730.000	1	730.000	1	730.000	0	0	0	0	0	0	1	690.000	100%	95%			
			Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan RKA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	-	0	1	730.000	1	730.000	1	730.000	0	0	0	0	0	0	1	690.000	100%	95%			
			Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	-	0	-	0	1	730.000	1	730.000	0	0	0	0	0	0	1	690.000	100%	95%			
			Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen Perubahan DPA-SKPD	Jumlah Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah	Dokumen	-	0	-	0	-	0	1	730.000	0	0	0	0	0	0	1	690.000	100%	95%			
			Sub Keg. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Jumlah Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD dan Laporan Hasil Koordinasi Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD	Laporan	3	35.760.000	3	89.150.000	3	150.440.000	3	217.810.000	3	31.700.000	3	82.130.000	3	128.830.000	3	205.532.000	100%	94%			
			Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Keuangan Perangkat Daerah	Persen	25	1.392.520.313	50	2.927.887.164	75	3.926.917.476	100	4.817.952.326	25	1.109.448.055	50	2.338.485.977	75	3.339.501.861	100	4.471.381.217	100%	93%			Sekretaris
			Sub Keg. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN	Jumlah Orang yang Menerima Gaji dan Tunjangan ASN	Org./Bln.	44	1.392.520.313	44	2.927.887.164	44	3.926.917.476	44	4.817.952.326	44	1.109.448.055	44	2.338.485.977	44	3.339.501.861	44	4.471.381.217	100%	93%			Ka Sub Bag. Keuangan
			Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah	Terlaksananya Administrasi Umum Perangkat Daerah	Persen	25	29.576.300	50	40.336.600	75	88.314.150	100	116.105.000	16,67	8.820.000	50	26.083.000	75	52.866.100	100	104.943.550	100%	90%			Sekretaris
			Sub Keg. Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor	Jumlah Paket Peralatan dan Perlengkapan Kantor yang Disediakan	Paket	0	0	0	0	1	14.500.000	3	14.500.000	0	0	0	0	0	0	3	13.718.250	100%	95%			Ka Sub Bag. Umpeg
			Sub Keg. Penyediaan Bahan Logistik Kantor	Jumlah Paket Bahan Logistik Kantor yang Disediakan	Paket	3	6.034.250	3	7.542.500	3	15.607.750	3	22.354.000	0	0	2	7.524.000	2	10.653.600	3	20.352.000	100%	91%			
			Sub Keg. Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan	Jumlah Paket Barang Cetak dan Penggandaan yang Disediakan	Paket	2	1.087.500	2	2.475.000	2	4.713.000	2	5.925.000	0	0	0	0	1	2.817.000	2	5.837.100	100%	99%			
			Sub Keg. Penyediaan Bahan Material	Jumlah Paket Bahan/Material yang Disediakan	Paket	4	4.969.550	4	9.459.100	4	17.958.400	4	24.826.000	0	0	2	8.399.000	3	12.635.500	4	21.587.500	100%	87%			
			Sub Keg. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	umlah Laporan Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD	Laporan	2	14.110.000	2	14.110.000	2	24.610.000	2	33.000.000	1	8.820.000	2	10.160.000	2	24.460.000	2	32.850.000	100%	100%			
			Sub Keg. Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Jumlah Dokumen Dukungan Pelaksanaan Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik pada SKPD	Dokumen	1	3.375.000	1	6.750.000	1	10.925.000	1	15.500.000	0	0	0	0	1	2.300.000	1	10.598.700	100%	68%			Ka Sub Bag. Umpeg
			Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah	Persen	25	573.531.471	50	1.416.089.135	75	2.215.126.942	100	3.247.186.280	25	814.443.124	50	1.382.076.803	75	2.166.587.172	100	3.187.922.984	100%	98%			Sekretaris
			Sub Keg. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik yang Disediakan	Laporan	3	15.764.325	6	30.713.145	9	42.298.940	12	53.957.300	3	9.703.107	6	24.854.623	9	36.532.140	12	48.659.784	100%	90%			Ka Sub Bag. Umpeg
			Sub Keg. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor	Jumlah Laporan Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor yang Disediakan	Laporan	3	557.767.146	6	1.385.375.990	9	2.172.828.002	12	3.193.228.980	3	804.740.017	6	1.357.222.180	9	2.130.055.032	12	3.139.263.200	100%	98%			
	Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Terlaksananya Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah	Persen	25	136.520.500	50	377.680.500	75	602.386.500	100	751.637.500	25,00	102.000.000	50	262.154.819	75	398.230.919	100	713.205.886	100%	95%			Sekretaris		
	Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	2	36.820.500	4	124.980.500	6	144.480.500	8	162.480.500	2	23.000.000	4	49.862.800	6	95.717.800	8	152.622.800	100%	94%			Ka Sub Bag. Umpeg		

Sasaran	Indikator	Target	Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Indikator Program/ Kegiatan / Sub Kegiatan	Satuan	Target								Realisasi								Catatan	Tindak Lanjut	Penanggung Jawab		
						I		II		III		IV		I		II		III		IV					Capaian	
						K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.	K	Rp.				K	Rp.
			Sub Keg. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas Operasional atau Lapangan	Jumlah Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan yang Dipelihara dan dibayarkan Pajaknya	Unit	3	99.700.000	6	230.600.000	9	396.400.000	11	525.421.000	2	79.000.000	4	210.770.875	6	297.782.875	11	499.820.792	100%	95%			
			Sub Keg. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya	Jumlah Peralatan dan Mesin Lainnya yang Dipelihara	Unit	0	0	5	7.400.000	10	17.730.000	15	19.960.000	0	0	5	1.521.144	10	2.731.244	15	18.797.894	100%	94%			
			Sub Keg. Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya	Jumlah Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya yang Dipelihara/Direhabilitasi	Unit	0	0	1	14.700.000	1	43.776.000	1	43.776.000	0	0	0	0	1	1.999.000	1	41.964.400	100%	96%			

Rangkasbitung, Januari 2026
KEPALA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN LEBAK



YADI BASARI GUNAWAN, SE., M.Si.
NIP. 19751101 199503 1 002